

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAGELANG**



TESIS

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan**

**MF. ANITA WIDHY HANDARI
NIM. 21080111400016**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2012**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Disusun oleh

**MF. ANITA WIDHY HANDARI
NIM. 21080111400016**

**Mengetahui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Ir.Azis Nur Bambang, MS

Dr.Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

**Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan**

Prof. Dr. Ir. Purwanto,DEA

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAGELANG

Disusun oleh :

MF. Anita Widhy Handari

21080111400016

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Nopember 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Dr. Ir. Azis Nur Bambang, MS

.....

Anggota

1. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

2. Dr. Dra. Endang Larasati, MS

.....

3. Dr. Dra. Kismartini, MSi

.....

P E R N Y A T A A N

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang Saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan sebuah atau sebagian tesis ini bukan hasil karya Saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, November 2012

MF. Anita Widhy Handari

BIODATA PENULIS



MF. Anita Widhy Handari lahir di Semarang, pada tanggal 15 Maret 1976, pada tahun 1995 lulus Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Semarang, pada tahun 1999 lulus S-1 pada Jurusan Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada tahun 2003 mulai bertugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang. Pada tahun 2011 mendapat tugas belajar melanjutkan pendidikan pada Magister ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, dengan judul tesis : “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang“, telah selesai pada bulan Nopember 2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAGELANG”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai Gelar Magister Ilmu Lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, yang telah membantu penulis sampai tersusunnya tesis ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Azis Nur Bambang, MS dan Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA yang bertindak sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes,PKK selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, dan kepada Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti program pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Rasa terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren-Bappenas) dan Pemerintah Kabupaten Magelang atas beasiswa dan kesempatan belajar yang diberikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Bandongan, serta anggota Tim IPPT Kabupaten Magelang dan semua pihak yang menjadi obyek penelitian.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Angkatan ke-32 atas kebersamaan dan persahabatan yang indah selama ini. Juga kepada semua rekan dan sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini.

Dan tentu saja, Penulis menyampaikan beribu rasa terima kasih kepada orang tua Bapak Y. Soemanto, Ibu B. Ninik Sartini, Bapak Lebiyartono, dan Ibu Widya Yunizar Rachmi yang senantiasa turut memberikan dorongan, dukungan dan doa restu dalam penyelesaian tesis ini. Demikian juga rasa terima kasih yang tak terhingga kepada suamiku Budi Riyanto serta anak-anakku tersayang Fia Aurelia Andian dan Ryou Adyaraka Andian atas kasih sayang, kesabaran, pengertian dan pengorbanannya sehingga Penulis dapat melakukan studi dan penelitian hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi para pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Semarang, November 2012

MF. Anita Widhy Handari

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
BIODATA PENULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penelitian Terdahulu	7
1.6. Road Map Penelitian	9
1.7. Kerangka Pemikiran Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1. Implementasi Kebijakan	11
2.1.1. Model Implementasi Top Down	12
2.1.1. Model Implementasi Bottom Up	13
2.2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	15
2.3. Tata Guna Lahan	18
2.4. Konversi Lahan	18
2.5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	21
2.6. Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 25
3.1. Tipe Penelitian	25
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	25
3.2.1. Ruang Lingkup Substansial	25
3.2.2. Ruang Lingkup Wilayah	26
3.3. Populasi dan Sampling	29
3.4. Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Letak Wilayah	38
4.1.2. Penggunaan Lahan	40
4.1.3. Penduduk.....	41
4.2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang	42
4.3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang	48
4.4.1. Sosialisasi.....	49
4.4.2. Petugas ..	51
4.4.3. Dana	52
4.4.4. Respon Implementor	53
4.4.5. Pemahaman Terhadap Kebijakan.....	54
4.4.6. Peraturan Pendukung	55
4.4.7. SOP	56
4.4.8. Koordinasi Antar Instansi	57
4.4.9. Tingkat Pendidikan	58
4.4.10. Usia	58
4.4.11. Kepemilikan Lahan	59
4.4.12. Alasan Konversi.....	61
4.4.13. Dukungan Publik	63
4.4.14. Komitmen Pelaksana	64
4.5. Strategi Kebijakan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	5
Tabel 2. Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori Geoge C Edward III Dan Donald Van Meter dan Carl E Van Horn	12
Tabel 3. Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori Mazmanian dan P. Sabatier	13
Tabel 4. Data Yang Dibutuhkan.....	31
Tabel 5. Kriteria Penilaian Variabel.....	32
Tabel 6. Skala Kepentingan Saaty	37
Tabel 7. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Magelang	40
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang	41
Tabel 9. Luas Wilayah, Jumlah penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2010	42
Tabel 10. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magelang Tahun 2005-2011	42
Tabel 11. Matriks Kriteria Konversi Lahan Sawah	45
Tabel 12. Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang Tahun	47
Tabel 13. Gambaran Kegiatan Sosialisasi.....	50
Tabel 14. Pemahaman Petugas tentang Perlindungan Lahan Pertanian	51
Tabel 15. Tingkat Pendidikan Responden	58
Tabel 16. Gambaran Usia Responden.....	58
Tabel 17. Kondisi Luas Lahan	59
Tabel 18. Status Kepemilikan Lahan	60
Tabel 19. Alasan Masyarakat Melakukan Konversi lahan Pertanian	61
Tabel 20. Gambaran Dukungan Masyarakat terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	63
Tabel 21. Izin Perubahan Penggunaan lahan Pertanian	64
Tabel 22. Aspek – Aspek Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	67
Tabel 23 Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Road Map Penelitian	9
Gambar 2.	Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	10
Gambar 3.	Gambar Peta Sawah Kecamatan Mertoyudan	27
Gambar 4.	Gambar Peta Sawah Kecamatan Bandongan	28
Gambar 5.	Peta Lokasi Penelitian	39
Gambar 6.	Grafik Perubahan Luas Lahan Sawah	43
Gambar 7.	Kriteria Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	68
Gambar 8.	Prioritas Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jadwal Penelitian	77
Lampiran 2. Penelitian Terdahulu	78
Lampiran 3. Panduan Wawancara	80
Lampiran 4. Kuesioner untuk masyarakat	84
Lampiran 5. Kuesioner untuk instansi	90
Lampiran 6. Kuesioner AHP	97
Lampiran 7. Analisa Regresi	103
Lampiran 8. Analisa Pendapat Gabungan Para Responden	105
Lampiran 9. Analisa Keseluruhan tentang Kriteria dan Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	106
Lampiran 10. Foto – Foto	107

ABSTRACT

Important issues in the current development have been dealing with sustainable agriculture. Following the rate of land agriculture conversion, agricultural resources have become more important to concern, especially food agriculture. In order to control the agricultural land conversion to non agricultural uses the government has issued Act No. 41 since 2009. The Act required Protection of Sustainable Food Agricultural Area. This research aimed to examine the implementation of the protection and factors and strategies of the protection.

The research used a descriptive technique by a mixed method. Variables and indicators in the implementation of Protection of Sustainable Food Agricultural Area includes socialization, policy implementors, funds, implementors' responses, knowledge about the policy, supporting regulations, SOP, interagency coordination, education, age, land ownership, community perception and implementors' commitment. The research used agricultural land owners who have as well as have not converted their land use and IPPT members as the policy implementors as the study objects.

Results of the observation showed that the implementation of the Act No. 41/2009 in Magelang Regency had reached location identification phase. It caused the indicator and variable research did not significantly affect the implementation of the policy on the sustainable agricultural area protection.

According to the AHP analysis ecological aspects and alternatives of land and water conservation became the first priority to deal with. It proved that the protection of the sustainable agricultural area related to the environmental sustainability. Efforts that became the first priority were land and water conservation. It was due to the fact effects of land damages had an indirect effect on the agricultural production. No sustainable agriculture will take place without conservation efforts.

Keywords: conversion, protection, land, strategy.

ABSTRAK

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, telah diterbitkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi pencapaiannya

Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode gabungan (*mixed method*). Adapun variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, persepsi masyarakat dan komitmen pelaksana. Obyek penelitian adalah para pemilik lahan pertanian baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi dan anggota IPPT sebagai pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini menyebabkan variabel dan indikator penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan analisis AHP menunjukkan bahwa aspek ekologi dan alternatif konservasi tanah dan air menempati prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan. Dengan kondisi lingkungan dewasa ini, sistem pertanian konservasi dianggap tepat untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci : Konversi, perlindungan, lahan, strategi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris, dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, menimbulkan konversi lahan pertanian. Pola konversi lahan berdasarkan analisis perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 1994-2004 terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya. Konversi lahan banyak terjadi di Jawa. Selama periode 1979-1999 tercatat seluas 625.459 (38,43%) atau 31.273 ha/tahun lahan sawah di Jawa telah terkonversi (Isa, 2006).

Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi. Pasandaran (2006), mengatakan bahwa ada tiga fungsi utama yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Pertama, fungsi yang menopang produksi pangan, lahan, air, praktek bercocok tanam, dan kelembagaan yang terkait merupakan elemen yang diperlukan dalam proses produksi. Fungsi yang kedua adalah fungsi konservasi. Termasuk dalam fungsi ini adalah pemeliharaan elemen-elemen biofisik yang ada, seperti jaringan irigasi dan persawahan. Apabila elemen-elemen tersebut terpelihara maka fungsi konservasi dapat berlangsung dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah pewarisan nilai-nilai budaya. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah kapital sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan konflik dalam rangka pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu elemen dari nilai-nilai budaya.

Menurut Pasandaran (2006), dengan perkembangan yang telah berlangsung ribuan tahun, sistem persawahan telah memelihara keberlangsungan

sistem produksi dan lingkungan hidup dan juga mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Namun demikian, eksistensi sistem persawahan menghadapi berbagai ancaman sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif. Lahan sawah di daerah padat penduduk seperti Jawa mengalami konversi menjadi lahan untuk berbagai keperluan.

Menurut Pasandaran (2006), ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan, tetapi dapat dirasakan secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping menurunnya produktivitas, konversi lahan berdampak lebih lanjut pada kekeringan dan serangan hama. Konversi lahan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali), sementara upaya menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh anggaran pembangunan, keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, perlu kiranya ada upaya-upaya pengendaliannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Rosyid Harjono (2005) pengendalian konversi lahan pertanian merupakan sebuah sistem yang melibatkan peraturan dan pelakunya. Sehingga diperlukan adanya keterikatan misi antar instansi agar dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam rangka pengendalian lahan pertanian. Disamping juga perlu adanya sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lahan pertanian demi ketahanan pangan.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sudah selayaknyalah jika negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara berkewajiban menjamin hak asasi warganegaraanya atas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- mewujudkan revitalisasi pertanian

Mengingat kondisi lahan pertanian di Pulau Jawa adalah lahan yang subur sangat disayangkan jika dikonversi untuk kegiatan non pertanian. Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan import.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kabupaten Magelang melakukan penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan. Sejalan dengan itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud diperlukan adanya kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Magelang adalah mewujudkan sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air. Dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam RTRW nya Kabupaten Magelang telah merencanakan pengelolaan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering seluas 42.070 hektar yang ditetapkan sebagai lahan perlindungan, yang tersebar di 21 kecamatan.

Dari tahun ke tahun luas lahan sawah di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Pada tahun 2005 lahan sawah di Kabupaten Magelang tercatat seluas 37.445 Ha dan menyusut hingga tinggal 37.219 Ha pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa praktek konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian masih terjadi. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang diperoleh data mengenai pengajuan izin perubahan penggunaan lahan pertanian, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 47, tahun 2011 sebanyak 22 dan pada tahun 2012 sebanyak 15 pengajuan. Ini belum termasuk yang melakukan konversi tanpa melalui prosedur perizinan yang resmi. Adapun perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Tahun : 2003 s/d 2011**

No	Tahun	Penggunaan Tanah Semula					Penggunaan Tanah Saat ini				
		Sawah	Tegalan	Kebun Campuran	Tanah Kosong	Jumlah	Permuki- man	Industri	Prasara- na/Jasa	Perdagangan	Jumlah
		1 X Padi (m2)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2003	193.997	36.010			230.007	179.007	45.000		6.000	230.007
2	2004	169.294	4.585	2.830	1.720	178.429	158.879	4.550		15.000	178.429
3	2005	139.867	10.640			150.507	148.232	1.865	15.720	2.275	168.092
4	2006	208.141	12.981	480	2.155	223.757	197.036	2.486	20.215	4.020	223.757
5	2007	174.232	11.978		8.840	195.050	162.327	6.380	17.063	9.280	195.050
6	2008	107.643	21.515		37.044	166.202	154.314	0	8.012	1.690	166.978
7	2009	9.140	6.521		51.449	67.110	64.349	0	2.765	0	67.114
8	2010	36.515	19.526	1.755	22.176	79.972	60.857		5.237	13.878	79.972
9	2011	42.259	22.379		1.450	66.088	14.755		32.992	2.280	50.027

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Data dan kejadian diatas memperlihatkan bahwan praktek konversi lahan masih banyak terjadi di Kabupaten Magelang. Di sisi lain Dinas Pertanian Kabupaten Magelang memiliki visi mewujudkan pertanian tangguh, efisien, berwawasan lingkungan dan berorientasi agribisnis. Dalam salah satu misinya Dinas Pertanian berupaya memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktifitas, meningkatkan intensitas pertanaman, pengamanan produksi dan pengembangan diversifikasi pangan. Untuk dapat dicapai kondisi ketahanan pangan seperti dalam misi tersebut diperlukan adanya jaminan ketersediaan lahan pertanian, oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Magelang

1.2. Perumusan Masalah

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Magelang semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan inilah yang sering kali tidak diperhitungkan, seperti meningkatnya lahan kritis, meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi, serta

terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Melalui Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan adanya dorongan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk mencegah hilangnya manfaat perlindungan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas memunculkan *research problem* sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang ?
2. Faktor –faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang.
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang.
3. Menentukan strategi dalam mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh jenjang pendidikan S-2 Program Magister Ilmu Lingkungan
2. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan masukan bagi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Manfaat Aplikatif

- Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, lahan pertaniannya harus dipertahankan.
- Bagi pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan alih fungsi lahan pernah dilakukan di Kabupaten Kendal pada tahun 2005 oleh Muhtar Rosyid Harjono, dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal”. Menurut Harjono (2005), tidak efektifnya implementasi kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Kendal disebabkan oleh faktor tidak lengkap dan tidak berfungsinya secara sempurna peraturan pengendalian alih fungsi lahan, serta ketidaktaatan terhadap peraturan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemberi izin.

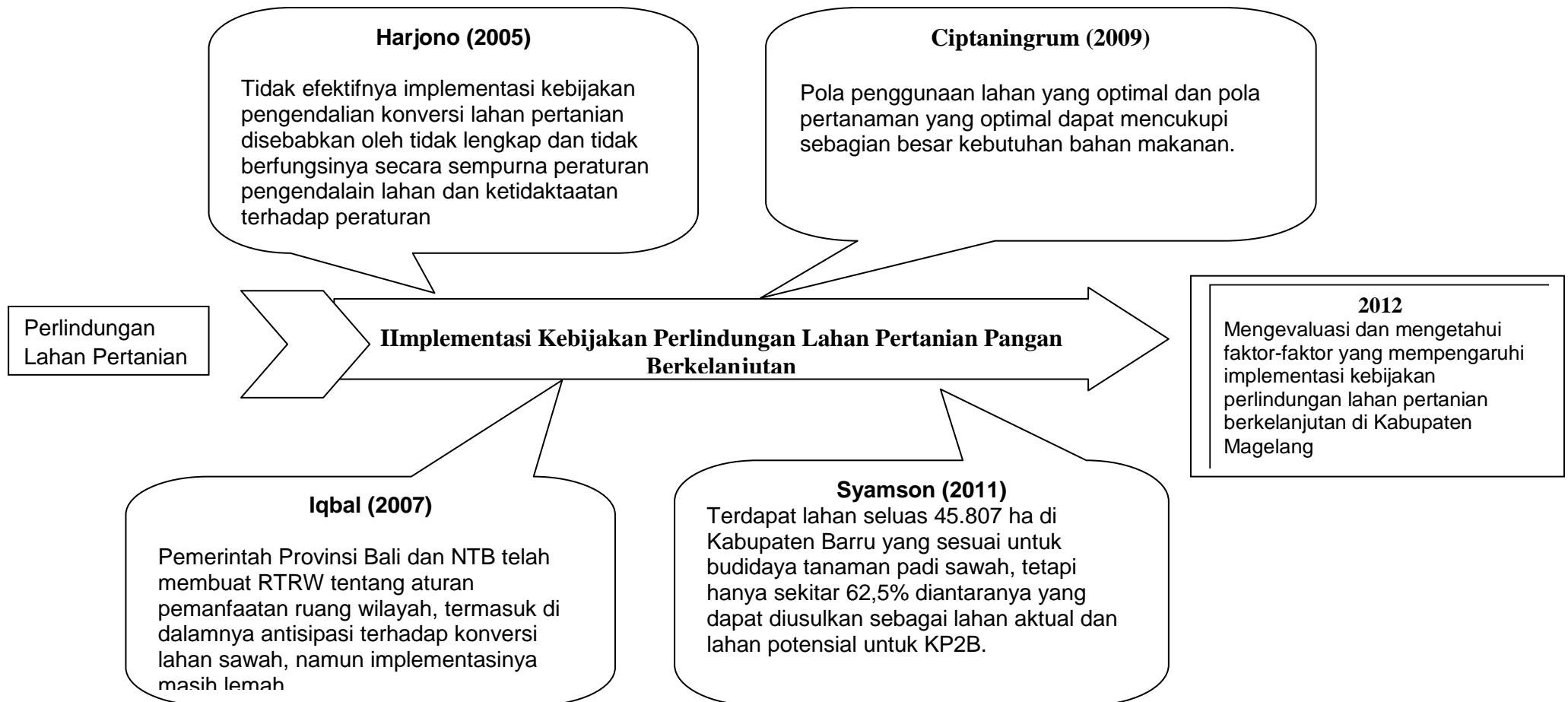
Tahun 2007, Muhammad Iqbal melakukan penelitian dengan judul “Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi setempat telah membuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tentang aturan pemanfaatan ruang wilayah, termasuk di dalamnya antisipasi terhadap konversi lahan sawah, namun implementasinya masih lemah.

Penelitian dengan judul “Optimasi Penggunaan Lahan Untuk Perlindungan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Purwokerto)”, dilakukan oleh Yatin Ciptaningrum pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan yang optimal dan pola pertanaman yang optimal di kawasan perkotaan Purwokerto dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan bahan makanan.

Upaya untuk menginventarisasi luas lahan sawah yang dijadikan dasar kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Magelang. Penelitian serupa mengenai identifikasi kawasan pertanian berkelanjutan pernah dilakukan oleh Anna Buana Syamson pada tahun 2011 dengan judul “Identifikasi Potensi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk Menyusun RTRW Kabupaten Barru Sulawesi Selatan”.

Lebih lengkap mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat dalam lampiran.

1.6. Road Map Penelitian



Gambar 1. Road Map Penelitian

I N P U T | P R O S E S | O U T P U T

```

graph TD
    A[Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi dan industri] --> B[Konversi lahan pertanian ke non pertanian]
    B --> C[Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan]
    C --> D[Bagaimana implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang?]
    E[Landasan Umum Penelitian] --> D
    F[Tinjauan Pustaka] --> D
    D --> G[Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan]
    G --> H[Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang]
    H --> I[Kesimpulan dan rekomendasi]

```

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Implementasi Kebijakan

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan menurut James E Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sekelompok aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sejalan dengan itu seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Wahab, 2008).

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Ruang lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya suatu kebijakan publik melalui beberapa tahap, sebagai berikut : formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi dan evaluasi.

Menurut Wahab (2008), yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang implementasi diantaranya adalah Masmanian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006).

Pada tahap implementasi dibahas tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk implementasi sederhana hanya melibatkan satu implementor, sedangkan untuk kebijakan yang bersifat makro melibatkan lebih banyak implementor (Subarsono, 2011)

Dalam implementasinya kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh, dimana model-model tersebut dalam prosesnya mengacu pada dua perspektif yaitu pendekatan top down maupun bottom up:

1.1.1. Model Implementasi Top Down

Teori implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan top down, diantaranya yang dikemukakan George C Edwards III, Donald Van Meter dan Carl E Van Horn.

Tabel 2. Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan teori George C Edwards III dan Donald Van Meter dan Carl E Van Horn

No	Teori	Variabel	Keterangan
1	George C. Edwards III	Komunikasi	Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan/komunikasikan kepada kelompok sasaran
		Sumberdaya	Sumberdaya dapat berupa finansial, sumber daya manusia maupun sarana prasarana
		Disposisi	Persamaan persepsi, sikap, atau perspektif dengan pembuat kebijakan
		Struktur Birokrasi	Aspek struktur yang berpengaruh adalah SOP

No	Teori	Variabel	Keterangan
2	Donald Van Meter dan Carl E van Horn	Standar dan sasaran kebijakan	Harus jelas dan terukur sehingga dapat teranalisis
		Sumberdaya	Sumber Daya Manusia dan Non Manusia
		Hubungan antar organisasi	Dalam implementasi perlu kerjasama/koordinasi antar instansi
		Karakteristik agen pelaksana	Mencakup norma-norma, struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi
		Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Sumber daya ekonomi lingkungan yang mampu mendukung implementasi kebijakan
		Disposisi implementor	Mencakup tiga hal penting : respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor

Sumber : Subarsono, 2011

Fokus utama dalam pendekatan *top down* ini adalah menekankan pada pelaksanaan kebijakan untuk mengefektifkan suatu pekerjaan. Dimana proses kebijakan merupakan suatu rangkaian perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan birokrasi.

1.1.2. Model Implementasi Bottom Up

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan model implementasi kebijakan yang bersifat bottom up, sebagai berikut :

Tabel 3. Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan P Sabatier

Teori	Variabel	Keterangan
D. Mazmanian dan P. A. Sabatier	Karakteristik masalah	Mudah/ tidaknya masalah dikendalikan mencakup: 1. Kesulitan teknis

Teori	Variabel	Keterangan
		2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi 4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
	Karakteristik kebijakan	Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi mencakup: 1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 2. Dukungan teori kausal yang memadai 3. Ketepatan alokasi sumber daya 4. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana 5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana 6. Rekrutmen pejabat pelaksana 7. Akses formal pihak luar
	Lingkungan	Variabel lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: 1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 2. Dukungan publik 3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih 4. Dukungan dari pejabat atasan 5. Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Sumber : Subarsono, 2011

Fokus utama dalam pendekatan *bottom up* adalah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari level implementasi bawah. Dalam pendekatan ini juga melibatkan adanya partisipasi publik. Keuntungan dari pendekatan *bottom up* adalah adanya perhatian pada hubungan formal dan informal jaringan pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini digunakan model implementasi *bottom up* maupun *top down*. Implementasi kebijakan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 ditinjau baik dari pelaksana kebijakan maupun dari sasaran dari kebijakan. Adapun faktor-faktor yang dilihat dalam implementasi undang – undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan.

1.2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Hadi (2005), jika kita mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED (World Commission on Environment and Development) maka pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara integritas ekologi, keadilan sosial dan kesempatan menentukan nasib sendiri.

Berdasarkan definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED, Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai manajemen dan konservasi basis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpenuhkannya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan menkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial (FAO, 1989).

Peningkatan jumlah penduduk dapat menambah tekanan pada sumberdaya dan memperlambat peningkatan taraf hidup, hal ini disebabkan oleh distribusi sumberdaya. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat di capai bila pembangunan demografi selaras dengan perubahan potensi produktif ekosistem. Pembangunan berkelanjutan harus tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan di muka bumi ini; atmosfer, air tanah dan makhluk hidup. Produksi pertanian hanya dapat dilestarikan dalam jangka panjang bila lahan, air

dan hutan yang menjadi sandarannya tidak rusak. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik yang melindungi sumberdaya untuk melestarikan dan bahkan meningkatkan produktivitas pertanian (WCED, 1988).

Menurut WCED (1988), penerapan gagasan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keamanan pangan memerlukan perhatian yang bersistem terhadap pemulihan sumberdaya alam. Hal ini memerlukan pendekatan global yang difokuskan pada ekosistem pada tingkat nasional, regional dan global, dengan tata guna lahan yang terkoordinasi dan perencanaan yang seksama terhadap penggunaan air dan pemanfaatan hutan.

Menurut Suryana (2005), visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju usahatani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Dalam sebuah penelitian untuk mengukur pertanian berkelanjutan digunakan indikator sebagai berikut:

- Aspek Ekonomi, meliputi:
 1. Persentase return on asset (%)
 2. Efisiensi ekonomi
 3. Jumlah faktor produktivitas
 4. Persentase risiko
 5. Laba bersih per kapita
 6. Kredit digunakan
 7. Kepemilikan lahan pertanian
 8. Rasio investasi
 9. Rasio memperpanjang lahan pertanian
 10. Rasio investasi off-farm

- Aspek Sosial, meliputi:
 1. Ada tidaknya sistem pembuangan kotoran
 2. Jarak dari lembaga kesehatan terdekat
 3. Ada tidaknya sumber air minum
 4. Kondisi jalan beraspal
 5. Populasi petugas kesehatan
 6. Jumlah murid per guru
 7. Kondisi keamanan pertanian
 8. Kepadatan penduduk
 9. Jumlah anggota keluarga petani bertanggung
 10. Persentasi konversi lahan pertanian

- Lingkungan, meliputi:
 1. Teknis efisiensi
 2. Penggunaan pupuk kimia
 3. Penggunaan pestisida
 4. Jumlah pabrik yang ada
 5. Ada tidaknya konversi hutan untuk lahan pertanian
 6. Ada tidaknya konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
 7. Ukuran lahan pertanian organik

- Bio-fisik, meliputi:
 1. Keberadaan bahan organik
 2. Keanekaragaman tanaman
 3. Kondisi lahan
 4. Keberadaan dan kualitas sarana irigasi
 5. pH tanah
 6. Kemiringan lahan

1.3. Tata Guna Lahan

Selain sebagai penghasil tanaman pangan dalam hal ini padi, sawah juga memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, penjaga kelestarian budaya serta memberikan suasana khas pedesaan. Selain itu sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan, yaitu sebagai pengendali banjir dan erosi, mendaur ulang air dan limbah organik. Di samping nilai positif, sawah juga memiliki nilai negatif yang berkaitan dengan lingkungan. Nilai negatif dimaksud adalah dihasilkannya gas metan oleh sawah, yang merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca.

Sistem lahan sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan ekosistem sawah relatif stabil dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil, serta tingkat efisiensi penggunaan air yang relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan top soil. (Rustiadi dan Reti, 2008).

Menurut Notohadipawiro (1991), lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh jenis sumberdaya dominan dan intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya.

Sumberdaya lahan dapat mengalami perubahan karena aktivitas manusia. Penggunaan lahan (*land use*) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) penggunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

1.4. Konversi Lahan

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk

memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Rustiadi dan Reti, 2008)

Konversi lahan merupakan suatu akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), hal tersebut tercermin dari : (1) pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan, (2) adanya pergeseran kontribusi sektor- sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya ke sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa). Dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas yang *land rent* nya rendah ke aktivitas yang *land rent* nya tinggi. Yang dimaksud dengan *land rent* adalah nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu.

Tahapan dalam proses konversi lahan pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut : 1) pelepasan hak kepemilikan lahan, 2) pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan non pertanian (Siamatupang dan Irawan ,2003). Dampak lebih lanjut dari adanya konversi lahan pertanian adalah terganggunya ketahanan pangan, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan berkurangnya lahan pertanian otomatis akan mempengaruhi produksi beras. Dimana kondisi seperti ini tidak mudah untuk segera dipulihkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu :

1. Konversi lahan bersifat *irreversible*, yaitu lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian bersifat permanen. Karena dengan perubahan ini akan meningkatkan nilai lahan.
2. Upaya pemulihan kondisi seperti semula dengan mencetak lahan pertanian baru memerlukan waktu yang lama.
3. Keterbatasan sumberdaya lahan terutama di Pulau Jawa. Selain itu juga adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan pertanian dengan cara mencetak lahan pertanian baru dan memperbaiki irigasi.

4. Keterbatasan inovasi teknologi dalam peningkatan produktivitas padi sawah sehingga dapat mengatasi masalah penurunan produksi karena konversi lahan.

Oleh karena itu penanganan masalah konversi lahan pertanian sebenarnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1) mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada nonpetani, (2) mencegah alih fungsi lahan, dan (3) menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan.

Menurut Irawan (2005), Konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian lebih elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, yang dibarengi dengan meningkatkan permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Menurut Sumaryanto dan Suhaeti (1999) dalam Nurmanaf et al (2001), dampak konversi lahan dari aspek sosial ekonomi adalah kehilangan produksi pertanian dan nilai tambahnya, berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja pertanian dan pendapatan kerja yang dihasilkannya, irigasi yang dibangun dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran dan degradasi lingkungan, dan hancurnya beberapa kelembagaan lokal yang selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara itu, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat setempat.

1.5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersedian lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan

inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian (Simatupang dan Irawan, 2003)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- dilakukan kajian kelayakan strategis
- disusun rencana alih fungsi lahan
- dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
- disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

1.6. Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan

Alasan utama pengendalian konversi lahan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang finansial

Konversi lahan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Upaya perbaikan konversi lahan diantaranya adalah perbaikan fasilitas irigasi dan

pembukaan sawah baru, keduanya membutuhkan investasi untuk perbaikannya sangat besar, disamping memerlukan waktu yang lama.

2. Sudut pandang pelestarian lingkungan

Sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan, disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan *top soil*. Maka dengan adanya konversi lahan dipandang akan sangat mengganggu upaya pelestarian lingkungan.

3. Sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat

Konversi lahan akan mengganggu keseimbangan hubungan sistemik antara petani dengan lahannya. Sawah merupakan pengikat kelembagaan perdesaan. (Rustiadi dan Reti, 2008),

Menurut Siamatupang dan Irawan, (2003), untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan undang-undang yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu: (1) RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian dan (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian.

Berikut adalah bentuk-bentuk peraturan sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konversi lahan:

- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana.

- Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian.

Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas).
- 2) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.
- 3) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan.
- 4) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.
- 5) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode gabungan (*mixed methods*). Menurut Sarwono (2011), yang dimaksud dengan *mixed method* adalah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif dalam riset yang sedang dijalankan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian, karena periset berpendapat hasil temuannya akan menjadi lebih baik, lengkap dan komprehensif.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Substansial

Penelitian hanya menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Adapun variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :

1. Komunikasi
 - a. Sosialisasi
2. Sumberdaya
 - a. Petugas
 - b. Dana
3. Disposisi
 - a. Respon implementor
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan
4. Struktur Birokrasi
 - a. Peraturan pendukung
 - b. SOP
 - c. Koordinasi antar instansi

5. Lingkungan

a. Kondisi sosial ekonomi

- Tingkat pendidikan
- Usia
- Kepemilikan lahan
- Alasan konversi lahan

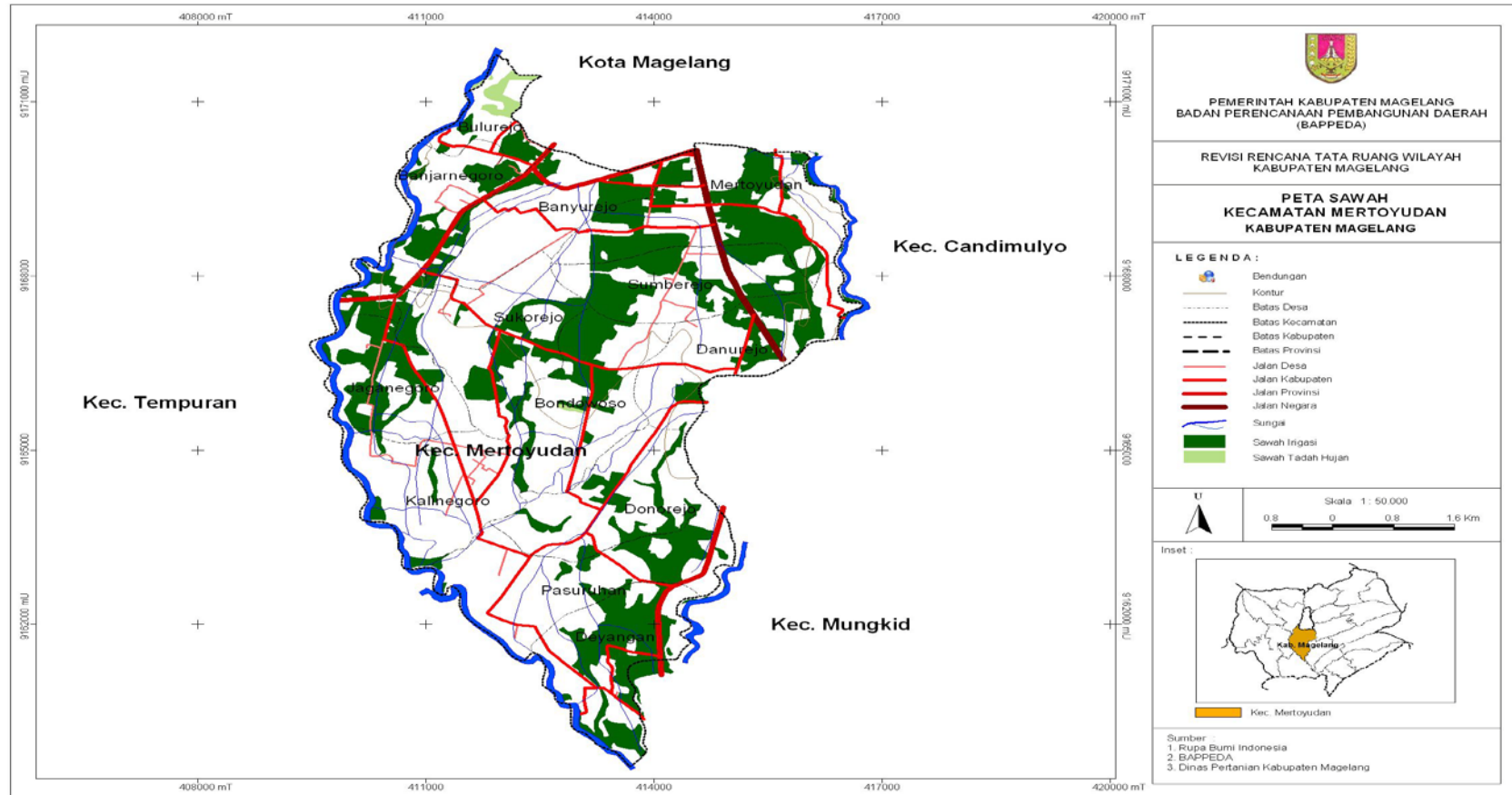
b. Dukungan publik

- Persepsi masyarakat
- Komitmen pelaksana

3.2.2. Ruang Lingkup Wilayah

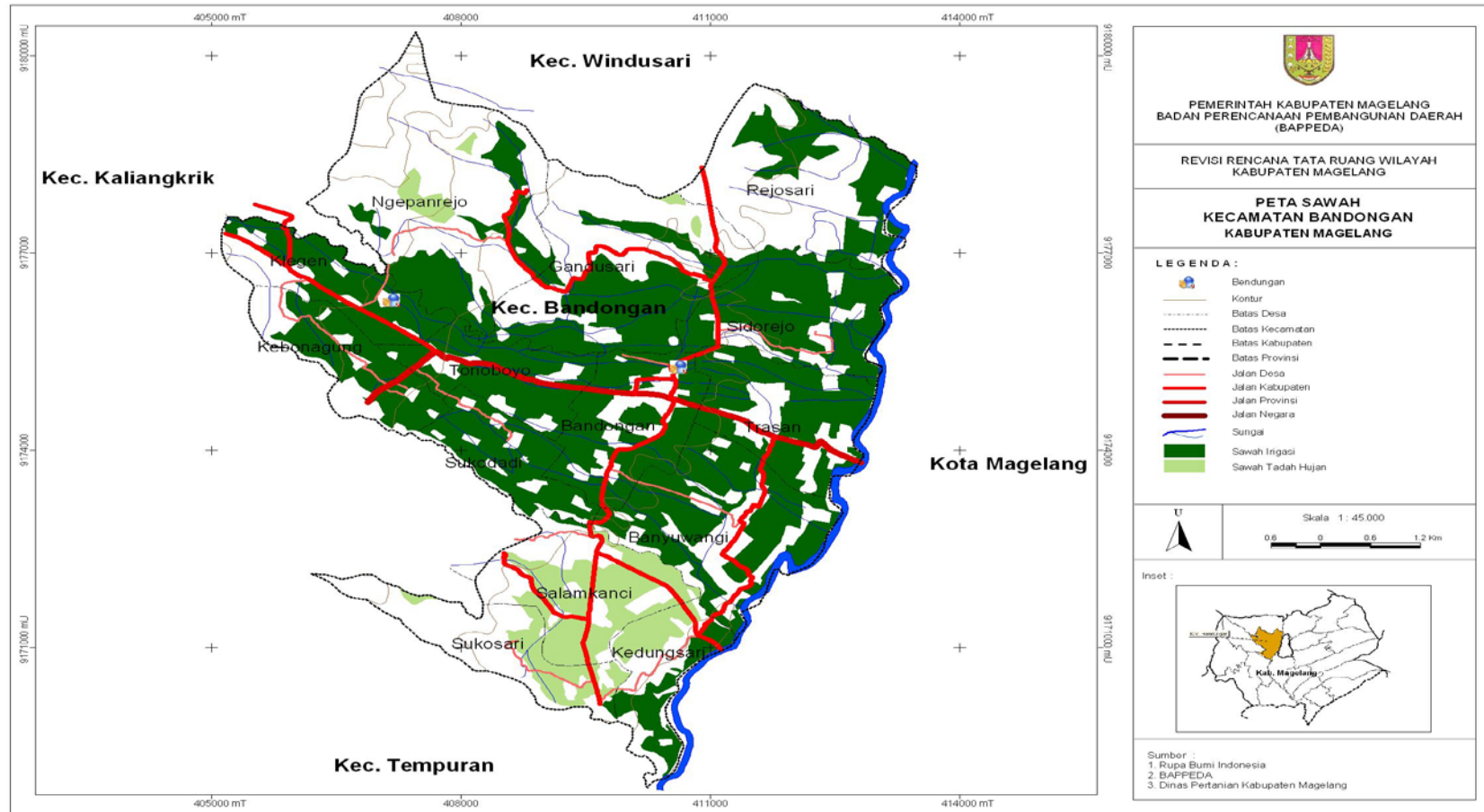
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang, yang memiliki luas lahan seluas 108.573 Ha, terdiri dari 32% untuk perkebunan, 25% sawah irigasi, 12 % sawah tadah hujan, 13% hutan, 11% pemukiman, dan sisanya untuk penggunaan lain. Dari 42.070 hektar lahan di 21 kecamatan yang direncanakan sebagai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dipilih 2 kecamatan sebagai lokasi penelitian yang memiliki luasan lahan perlindungan terbesar, yaitu Kecamatan Mertoyudan, dengan alasan merupakan daerah perkotaan dan Kecamatan Bandongan, dengan alasan merupakan daerah pedesaan.

Gambar 3. Peta Sawah Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang



Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang

Gambar 4. Peta Sawah Kecamatan Bandongan Kabupaten Bandongan



Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang

3.3. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian adalah pelaksana kebijakan dan para pemilik lahan pertanian pangan baik yang sudah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi lahan, di 2 kecamatan terpilih dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Kecamatan terpilih adalah Kecamatan Mertoyudan, dengan alasan merupakan daerah perkotaan dan Kecamatan Bandongan, dengan alasan merupakan daerah pedesaan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *quota sampling*. Menurut Nasution (2001) yang dimaksud dengan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini adalah para pemilik lahan, baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yang belum. Sedangkan Quota Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah dan kuota yang diinginkan. Dalam penelitian ini untuk masing-masing desa di tiap kecamatan diambil sampel 3 pemilik lahan yang belum melakukan konversi dan 3 pemilik lahan yang telah melakukan konversi. Kecamatan Mertoyudan terdiri dari 13 desa dan Kecamatan Bandongan 10 desa, sehingga total sampel adalah 138 petani.

Narasumber pelaksana kebijakan, penentuannya dengan teknik *judgment sampling*. Menurut Nasution (2001), teknik tersebut diambil karena responden terlibat langsung sehingga diharapkan mengetahui secara baik tentang perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan dampak yang timbul dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah anggota tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah) yang berjumlah 6 orang, yaitu terdiri dari unsur Bappeda, BPN, Disnabunhut, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan DPU-ESDM Kabupaten Magelang.

3.4. Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data yang bersifat primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara di lapangan terhadap para pemilik lahan baik yang telah mengkonversi

lahannya maupun yang belum dan para implementor kebijakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Bappeda, Dinas Pertanian, BPS dan BPN.

Data penelitian yang relevan dengan obyek penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, mengamati secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lahan pertanian pangan yang ada baik yang telah beralih fungsi maupun yang belum, melihat luasan lahan pertanian milik petani responden dari PBB nya, dan kondisi saluran irigasi di Kecamatan Mertoyudan dan kecamatan Bandongan.

2. Wawancara dan kuesioner

Wawancara dilakukan dengan aparat yang terkait dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditentukan secara *judgment sampling*, yaitu anggota tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah) yang terdiri dari:

- Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Bappeda,
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan Distanbunhut,
- Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN,
- Kepala Sub Bagian Pertanahan Setda,
- Staf Bina Manfaat dan Kerjasama DPU dan ESDM, serta
- Kepala Sub Bagian Hukum Setda.

Sedangkan kuesioner untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun informannya ditentukan secara *purposive* yaitu para pemilik lahan pertanian, baik yang sudah melakukan konversi maupun yang belum melakukan konversi lahan dari 2 kecamatan terpilih, masing-masing desa diwakili oleh 3 orang pemilik lahan yang belum melakukan konversi lahan dan 3 orang yang telah melakukan konversi lahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data-data yang telah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data diskriptif obyek penelitian. Meliputi data sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan yang diperoleh dari Bappeda dan BPN
- b. Data penggunaan lahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 yang berasal dari Bappeda, BPN dan Distanbunhut
- c. Data izin perubahan lahan sepuluh tahun terakhir dari BPPT.
- d. Data kependudukan dari BPS maupun dari monografi kecamatan dan desa.
- e. Produktivitas pertanian sepuluh tahun terakhir dari Distanbunhut.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai Tabel 4. berikut :

Tabel 4. Data yang Dibutuhkan

No	Kebutuhan Data	Sumber	Keterangan
I. Data Primer			
1.	Sikap Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian	BPN Bappeda Distanbunhut	Wawancara
2	Perilaku masyarakat terhadap konversi lahan	Masyarakat	Kuesioner
II. Data Sekunder			
1.	Peraturan Perundang-Undangan	BPN	Dokumen
2.	Data IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)	BPN dan BPMPT	Dokumen
3.	Data dan peta penggunaan lahan	BPN	Dokumen
4.	Data penduduk	BPS	Dokumen
5.	Data produktivitas pertanian	Distanbunhut	Dokumen

3.5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik tabulasi, yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan analisa yang dilakukan bersifat evaluatif dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang ada dengan

menggunakan tabel, diagram maupun peta. Analisa dilakukan dengan menilai isi kebijakan perlindungan lahan pertanian dalam mengatur pengendalian konversi lahan, serta menilai kinerja aparat pelaksana kebijakan dalam memberikan pertimbangan izin perubahan lahan pertanian.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Variabel

No	Variabel	Kriteria	Keterangan
1.	Sosialisasi	a. Sering	Sebulan 2 kali, juga melalui media massa
		b. Jarang	Sebulan sekali, tidak ada sosialisasi melalui media massa
		c. Tidak pernah	Belum pernah ada sosialisasi
2.	Petugas/aparat	a. Paham	Memiliki keahlian khusus, mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, paham tentang pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
		b. Kurang paham	Memiliki keahlian khusus, tetapi tidak mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
		c. Tidak paham	Tidak memiliki keahlian khusus, tidak mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
3.	Dana	a. Cukup	Bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II
		b. Kurang	Hanya bersumber dari APBD II
		c. Tidak ada	
4.	Respon implementor	a. Responsif	Adanya insentif bagi masyarakat yang menaati kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan
		b. Kurang responsif	Hanya menampung pengaduan masyarakat
		c. Tidak ada respon	Tidak ada tanggapan

No	Variabel	Kriteria	Keterangan
5.	Pemahaman kebijakan	a. Paham b. Kurang paham c. Tidak paham	Tahu dan mengerti tentang isi UU No. 41 tahun 2009 Pernah mendengar tentang UU No 41 tahun 2009 Tidak tahu UU No 41 Tahun 2009
6.	Peraturan pendukung	a. Lengkap b. Kurang lengkap c. Tidak lengkap	Ada PP dan Perda Belum ada Perda Tidak ada peraturan pendukung sama sekali
7.	SOP	a. Jelas b. Kurang jelas c. Tidak jelas	Mengatur tentang tujuan, sasaran, operasional, biaya, pelaporan dan monev Hanya berisi tujuan dan sasaran pelaksanaan Tidak ada SOP
8.	Koodinasi antar instansi	a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah	Tiap triwulan Tiap semester Tidak ada koordinasi
9.	Tingkat pendidikan masyarakat	a. SD b. SMP c. SMA/PT	
10.	Usia	a. < 40 tahun b. 40 – 60 tahun c. > 60 tahun	
11.	Kepemilikan lahan	a. Sewa b. Bagi hasil c. Milik sendiri	
12.	Alasan konservasi	a. Tinggi b. Sedang c. Rendah	Terkena proyek pembangunan Alasan ekonomi Lahan tidak potensial
13.	Dukungan publik	a. Setuju	Masyarakat paham tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan mendukung pelaksanaannya dengan tidak

No	Variabel	Kriteria	Keterangan
		b. Kurang setuju	mengkonversi lahannya Masyarakat tahu tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi tidak mendukung pelaksanaannya, masih mengkonversi lahannya
		c. Tidak setuju	Masyarakat tidak tahu tentang perlindungan lahan pertanian
14.	Komitmen pelaksana	a. Tinggi	Melarang adanya konversi lahan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum yang ada penggantinya
		b. Sedang	Masih ada konversi lahan yang diberikan izin
		c. Rendah	Tidak ada sanksi pelanggaran

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan digunakan analisa regresi menggunakan software SPSS versi 16, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} + \beta_{12} X_{12} + \beta_{13} X_{13} + \beta_{14} X_{14}$$

Dimana:

Y = implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

β_i = Koefisien regresi

X_1 = Sosialisasi

X_2 = Petugas

X_3 = Dana

X_4 = Respon implementor

X_5 = Pemahaman kebijakan

X_6 = Peraturan pendukung

X_7 = SOP

X_8 = Koordinasi antar instansi

X_9 = Penyuluhan pertanian

X_{10} = Usia

- X₁₁ = Kepemilikan lahan
- X₁₂ = Alasan konversi
- X₁₃ = Dukungan publik
- X₁₄ = Komitmen pelaksana

Penentuan strategi dalam mencapai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan digunakan analisa expert choice. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah Bappeda, BPN, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, LSM dan Akademisi.

Menurut Saaty (1993), Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan model yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an. AHP didesain untuk menangkap persepsi orang secara rasional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu melalui sebuah tahapan yang dirancang sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai alternatif. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Penyusunan strategi tersebut dilakukan oleh ahli-ahli yang kompeten dan mewakili yang berkaitan dengan alternatif yang akan disusun prioritasnya. Analisis AHP ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terukur (kuantitatif), yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks.

Tiga prinsip dasar dalam AHP menurut Saaty (1993), adalah sebagai berikut :

1. Menyusun secara hierarkis permasalahan yang dihadapi menjadi unsur – unsur yang terpisah.
2. Penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen – elemen menurut relatif kepentingannya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis.

Adapun langkah-langkah dalam metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, melalui diskusi dengan pakar yang mengetahui permasalahan serta dengan kajian referensi hingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Menyusun struktur hirarki yang dimulai dari tujuan umum, sub-tujuan, kriteria hingga penentuan sejumlah alternatif, berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sedangkan penentuan kriteria dan alternatif diperoleh dari hasil observasi dan diskusi dengan pakar.
3. Menyebarkan kuesioner kepada pakar untuk penentuan pengaruh masing-masing elemen terhadap masing-masing aspek atau kriteria dengan membuat matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Pengisian matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan bilangan/skala yang menggambarkan kepentingan suatu elemen dibanding elemen yang lain. Bentuk perbandingan berpasangan dalam matriks adalah sebagai berikut :

C	A1	A2	A3	A4	C : Kriteria
A1	1				A: Alternatif
A2		1			
A3			1		
A4				1	

4. Menyusun matrik pendapat individu dan gabungan dari hasil rata-rata yang diperoleh responden kemudian diolah dengan bantuan *expert choice versi 9.0*. Jika nilai konsistensinya $> 0,1$ maka hasil jawaban tidak konsisten dan jika nilai konsistensinya $< 0,1$ maka hasil jawaban konsisten.
5. Langkah selanjutnya adalah prioritas kriteria dan alternatif yang telah didapatkan tersebut digunakan untuk menyusun strategi.

Skala kepentingan yang digunakan dalam metode AHP ini adalah seperti dalam Tabel 5.

Tabel 6. Skala Kepentingan Saaty

Intensitas Pentingnya	Definisi	Keterangan
1	Kedua faktor sama penting	Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama terhadap tujuan
3	Faktor yang satu sedikit lebih penting daripada faktor yang lainnya	Pengalaman dan selera sedikit menyebabkan yang satu lebih disukai daripada yang lain
5	Faktor yang satu sifat lebih pentingnya kuat daripada faktor yang lainnya	Pengalaman dan selera sangat menyebabkan penilaian yang satu lebih dari penilaian yang lain, yang satu lebih disukai dari yang lain
7	Faktor yang satu sangat penting daripada faktor yang lainnya	Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain, dominasinya Nampak dalam kenyataan
9	Ekstrem penting	Bukti bahwa antara yang satu lebih disukai daripada yang laian menunjukkan kepatian tingkat tertinggi yang dapat dicapai.
2,4,6,8	Nilai tengah diantara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Diperlukan alasan yang masuk akal/kompromi.
Nilai kebalikan	Jika aktivitas i mendapat angka 2 jika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai $\frac{1}{2}$ dibanding nilai i.	

Sumber : Saaty, 2008

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Wilayah

Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Dilihat secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} 01'51''$ sampai dengan $110^{\circ} 26'58''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 19'13''$ sampai dengan $7^{\circ} 42'16''$ Lintang Selatan. Dengan batas administrasi sebagai berikut :

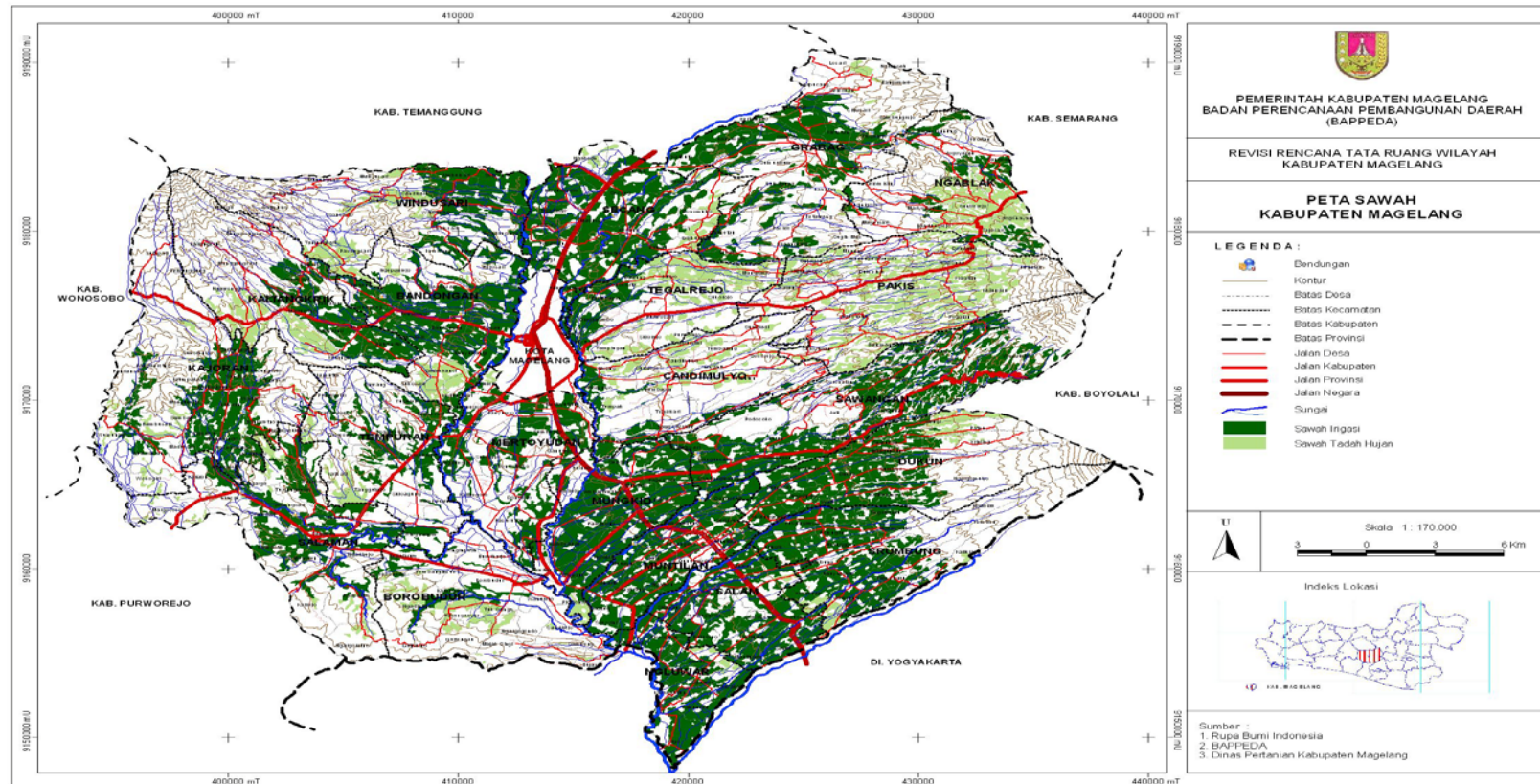
- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan D.I. Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Di Tengah : Kota Magelang

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa. Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha atau sekitar 3,34% luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara topografis Kabupaten Magelang merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan, karena dikelilingi oleh 5 (lima) gunung, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing dan Pegunungan Menoreh. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air, sehingga kondisi tanah di Kabupaten Magelang subur karena berlimpah sumber air dan sisa abu vulkanik.

Sesuai dengan keadaan wilayahnya, Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Wilayah Kabupaten Magelang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Das Bogowonto, serta memiliki 10 sungai besar atau sedang dengan debit air maksimum $2.314 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim penghujan dan minimum $110,3 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim kemarau dan serta 55 mata air dengan jumlah debit 9.509 liter/detik.

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian



Sumber : Bappeda Kabupaten Magelang

4.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang pada tahun 2011 terdiri dari 73,16% (79.437 Ha) lahan pertanian dan 26,84% (29.136 Ha) lahan bukan pertanian. Sebaran penggunaan lahan sawah merata di setiap kecamatan. Untuk lebih jelas, penggunaan lahan dalam kurun waktu tahun 2005- 2011 dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel. 7. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Magelang Tahun 2005-2011

	Luas Lahan (Ha)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 LAHAN PERTANIAN							
I.1 Lahan Sawah							
a. Irigasi taknis	6.678	6.678	6 624	6.624	6.623	6.623	6.623
b. Irigasi setengah tehnik	5.008	5.011	5 011	5.412	5.412	5.270	5.270
c. Irigasi sederhana	17.208	17.195	17 180	8.667	8.667	8.809	8.808
d. Irigasi desa non PU				8.268	8.283	8.263	8.263
e. Tadah hujan	8.551	8.534	8 435	8.261	8.236	8.255	8.255
Jumlah lahan sawah	37.445	37.418	37.250	37.232	37.221	37.220	37.219
I. 2. Lahan Bukan Sawah							
a. Tegal kebun	37.189	36.908	37 011	36.248	36.237	36.234	36.033
b. Perkebunan	223	238	237	234	234	256	276
c. Ditanami pohon/hutan rakyat	2.460	2.780	2 916	2.919	2.939	2.971	3.171
d. Kolam/Tebet/empang	139	140	145	145	145	152	153
e. Padang penggembalaan/ rumput.	2	2	2	2	2	2	2
f. Lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman pertanian,dll)				2.661	2.662	2.603	2.583
Jumlah lahan bukan sawah	40.013	40.068	40.311	42.209	42.219	42.218	42.218
2. LAHAN BUKAN PERTANIAN							
a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya	18.595	18.578	17 985	17.024	17.025	17.027	17.028
b. Hutan negara	7.879	7.874	7 874	7.874	7.874	7.874	7.874
c. Lainnya (jalan, sungai, danau lhn tandus,dll)	4.641	4.635	5 153	4.234	4.234	4.234	4.234
Jumlah lahan bukan pertanian	31.115	31.087	31.012	29.132	29.133	29.135	29.136
TOTAL	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2011

Dari Tabel 7 tampak bahwa luas lahan sawah pada tahun 2005 seluas 37.445 Ha berkurang dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 luas lahan sawah tinggal 37.219 Ha. Berkurangnya lahan sawah ini disebabkan oleh adanya konversi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, baik untuk keperluan perumahan, fasilitas umum maupun untuk perdagangan.

4.1.3. Penduduk

Berdasarkan data BPS, penduduk kabupaten Magelang tahun 2000 sebanyak 1.111.876 jiwa dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 1.181.916 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah sebesar 62%. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang berdasarkan hasil sensus dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang

Tahun	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,86	0,91	0,62

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2010

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mertoyudan yaitu 104.761 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 23,10 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan Kecamatan Mertoyudan merupakan pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Magelang, sehingga merupakan salah satu daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kajoran, yaitu 6,17 jiwa/Ha karena secara geografis wilayah Kecamatan Kajoran merupakan daerah perbukitan yang sangat luas, yaitu sebesar 8.341 Ha dan hanya berpenduduk 51.477 jiwa. Selengkapnya mengenai luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang tahun 2010 dapat di lihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2010**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Salaman	6.887	65.852	9,56
2	Borobudur	5.455	55.602	10,19
3	Ngluwar	2.244	29.857	13,31
4	Salam	3.163	44.455	14,05
5	Srumbung	5.318	44.782	8,42
6	Dukun	5.340	42.960	8,04
7	Muntilan	2.861	74.839	26,16
8	Mungkid	3.740	68.669	18,36
9	Sawangan	7.237	53.705	7,42
10	Candimulyo	4.695	45.341	9,66
11	Mertoyudan	4.535	104.761	23,10
12	Tempuran	4.904	46.395	9,46
13	Kajoran	8.341	51.477	6,17
14	Kaliangkrik	5.734	52.345	9,13
15	Bandongan	4.579	54.539	11,91
16	Windusari	6.165	46.298	7,51
17	Secang	4.734	74.921	15,83
18	Tegalrejo	3.589	53.200	14,82
19	Pakis	6.956	52.242	7,51
20	Grabag	7.716	81.749	10,59
21	Ngablak	4.380	37.927	8,66
Jumlah		108.573	1.181.916	10,89

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2010

4.2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang

Menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Magelang diakibatkan oleh adanya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, yang banyak terjadi di wilayah perkotaan maupun di pedesaan yang merupakan lokasi strategis. Konversi lahan pertanian sebagian besar untuk peruntukan perumahan, industri dan perdagangan. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2003-2011 dapat dilihat dalam Tabel 10.

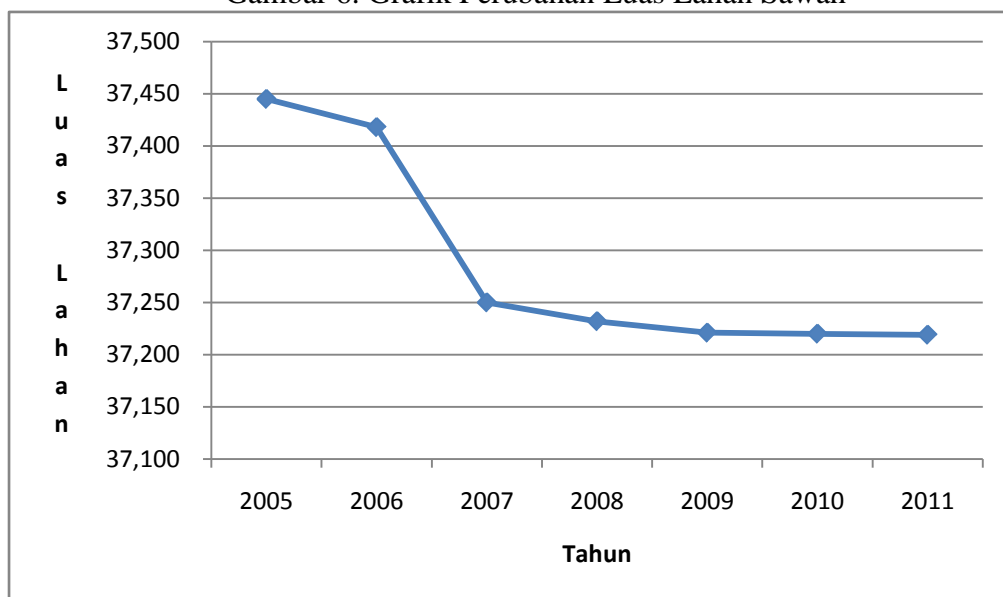
Tabel 10. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magelang Tahun 2005-2011

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Luas Sawah (Ha)	37.445	37.418	37.250	37.232	37.221	37.220	37.219

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2010

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat terdapat perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian dari tahun ke tahun, meskipun alih fungsi lahan tersebut masih dianggap normal, seperti dikatakan oleh Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Magelang. Grafik perubahan tersebut dapat dilihat dalam gambar 6. Secara terperinci perubahan penggunaan lahan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam lampiran.

Gambar 6. Grafik Perubahan Luas Lahan Sawah



Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2010, di olah

Gambar 6 menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. Penurunan luas lahan ini terjadi karena adanya arus konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Perubahan fungsi lahan ini disebabkan adanya kebutuhan akan tempat tinggal dan tempat usaha, seperti yang terjadi di Kecamatan Mertoyudan dan kecamatan Bandongan, terutama untuk lahan pertanian yang memiliki lokasi strategis, yaitu di tepi jalan besar.

Konversi lahan pertanian merupakan ancaman bagi keberlanjutan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah karena sempitnya kepemilikan lahan oleh masyarakat pada umumnya. Sempitnya lahan yang dimiliki menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut. Untuk melakukan konversi lahan pertanian ada prosedur yang

harus dilalui masyarakat, yang dikenal dengan pengajuan izin perubahan penggunaan tanah. Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kepada Bupati c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tim Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang terdiri dari kalangan Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan Setda. Selanjutnya Tim mengadakan koordinasi dan tinjauan lapangan untuk mengetahui kondisi dan lingkungan yang sebenarnya. Masing-masing anggota Tim IPPT memiliki pedoman sesuai tupoksi untuk menilai kondisi lahan yang akan dialihfungsikan, dan selanjutnya memberikan penilaian layak tidaknya lahan yang dimaksud untuk mendapatkan rekomendasi.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan. Dalam pelaksanaan perizinan alih fungsi lahan Pemerintah Kabupaten Magelang berpedoman pada aturan yang telah ada dan masih berlaku. Aturan tersebut adalah :

1. SE Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
2. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam surat keputusan ini diatur tentang tanah pertanian yang dapat dikonversi dan yang dipertahankan (pasal 2), dan kriteria tanah pertanian yang dapat dikonversi dan yang harus dipertahankan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2010-2030, mengatur tentang peraturan zonasi untuk kawasan pertanian

Dinas Pertanian sebagai salah satu anggota Tim Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) memiliki pedoman tentang lahan yang boleh dan tidak

boleh dikonversi. Kriteria lahan sawah yang boleh dan tidak boleh di konversi seperti dalam Tabel 11.

Tabel. 11. Matriks Kriteria Konversi Lahan Sawah

Jenis Sawah	Intensitas Panen			Keterangan
	2 kali padi atau lebih	1 kali padi, 1 kali palawija	1kali padi	
Teknis	V	V	VO	V = dipertahankan VO = dipertahankan dengan syarat tersedia air dan produktivitas lebih dari 65% X= boleh dikonversi
Setengah teknis	V	V	VO	
Sederhana	V	V	VO	
Tadah hujan	V	V	X	

Sumber : BPN kabupaten Magelang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 diatur mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah (Pasal 95 ayat 3). Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah mengenai peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian meliputi:

- dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
- dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
- diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian; dan
- diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian.

Kawasan pertanian di Kabupaten Magelang terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Adapun kriteria lahan sebagai lahan pertanian berkelanjutan menurut PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Lahan berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- b. Lahan memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk peruntukan pertanian pangan yang mempertimbangkan kelerengan, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- c. Lahan didukung dengan infrastruktur dasar yang memadai seperti sarana irigasi.
- d. Lahan telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dengan mempertimbangkan produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, konservasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan kriteria tersebut di atas maka di Kabupaten Magelang penyebarannya meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Pakis. Kecamatan dengan luasan lahan pertanian terbesar adalah Kecamatan Salaman, Mungkid, Mertoyudan, Secang, Grabag, Dukun, Bandongan dan Kajoran.

Kawasan lahan pertanian basah di Kabupaten Magelang memiliki fungsi dan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah merupakan sebidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang dimaksud dengan pangan pokok dalam undang-undang ini tidak menunjuk langsung pada beras, tetapi juga termasuk bahan pangan pokok lain seperti umbi-umbian, jagung dan lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan lahan pertanian berkelanjutan disini meliputi lahan sawah sebagai penghasil bahan pangan pokok beras dan lahan kering sebagai sumber pangan non beras.

Tabel 12. Luas lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang

Kecamatan	Luas wilayah	Luas Sawah	Luas Tegalan/Kebun	Luas LPPB	Luas LPPB (%)
Bandongan	4.579,00	2.599,01	337,89	2.936,90	64,14
Borobudur	5.455,00	797,21	196,09	993,30	18,21
Candimulyo	4.695,00	1.032,58	490,79	1.523,37	32,45
Dukun	2.840,00	1.004,84	192,23	1.197,07	42,15
Grabag	7.716,00	2.372,04	913,33	3.285,37	42,58
Kajoran	8.341,00	2.050,96	16,89	2.067,85	24,79
Kaliangkrik	5.734,00	1.581,69	540,79	2.122,48	37,02
Mertoyudan	4.535,00	1.227,89	468,83	1.696,72	37,41
Mungkid	3.740,00	2.335,48	293,66	2.629,14	70,30
Muntilan	2.861,00	1.297,05	217,55	1.514,60	52,94
Ngablak	4.380,00	1.423,59	221,91	1.645,50	37,57
Ngluwar	2.244,00	725,99	100,67	826,66	36,84
Pakis	6.956,00	2.159,26	38,08	2.197,34	31,59
Salam	3.165,00	740,10	285,03	1.025,13	32,39
Salaman	6.887,00	1.784,67	198,18	1.982,85	28,79
Sawangnan	7.237,00	2.354,85	539,41	2.894,26	39,99
Secang	4.734,00	3.180,95	440,10	3.621,05	76,49
Srumbung	5.340,00	1.049,22	709,99	1.759,21	32,94
Tegalrejo	3.589,00	1.513,51	508,77	2.022,28	56,35
Tempuran	4.904,00	1.106,65	680,90	1.787,55	36,45
Widusari	6.165,00	1.818,20	532,17	2.350,37	38,12
Jumlah	106.097,00	34.155,74	7.923,26	42.079,00	39,66

Sumber : Dokumen Penyusunan RTR PLPB Kabupaten Magelang

Lahan pertanian basah dan kering di Kabupaten Magelang dikelola untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar yang tersebar di 21 (dua

puluh satu) kecamatan. Rincian luas lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang adalah seperti dalam Tabel 12.

Data tentang luas lahan pertanian berkelanjutan diperoleh dari hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan Bappeda. Kegiatan identifikasi yang dilakukan Bappeda pada tahun 2011 meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum di Kabupaten Magelang yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari Badan Pertanahan Nasional, RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010-2030, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Magelang tahun 2010 dan hasil survey tahun 2012.

Dari hasil identifikasi lokasi yang dilakukan Bappeda pada tahun 2011 menghasilkan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun hingga saat ini belum dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah. Sehingga untuk proses kegiatan selanjutnya pun tidak dapat dilaksanakan secara optimal, seperti misalnya kegiatan pengendalian dan pengawasan sebab belum ada aturan hukum yang kuat.

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang

Hasil analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional sedangkan di Kabupaten Magelang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009.

Hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan oleh Bappeda pada tahun 2010 menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu

dilaksanakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, menurut anggota Tim IPPT perlu ada peraturan yang jelas dan tegas mengatur tentang lahan pertanian yang dilindungi, sanksi jika terjadi konversi pada lahan yang dilindungi, serta insentif yang akan diterima masyarakat jika melindungi lahan pertaniannya.

Belum adanya aturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menyebabkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang belum berjalan efektif. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa konversi lahan pertanian sekarang dilarang tetapi apa sanksi yang akan diterima jika masyarakat melanggarnya belum pernah ada, sehingga praktek konversi lahan masih dijumpai. Para pemangku kepentingan sendiri tidak dapat memberikan sanksi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Dengan ditetapkannya lahan-lahan yang telah diidentifikasi sebagai lahan yang dilindungi selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan berikutnya yang merupakan ruang lingkup dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan lanjutan tersebut diantaranya adalah pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

4.3.1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan para petugas dalam hal ini adalah tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan) terdiri dari Bappeda, BPN, Distanbunhut, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan, yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauh ini kegiatan sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka

perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum pernah diadakan. Tetapi menurut Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Magelang, persoalan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini telah sering disampaikan kepada masyarakat dalam acara-acara penyuluhan di desa-desa pada acara yang diadakan oleh BPN. Hal senada juga disampaikan dari pihak Bappeda, bahwa acara sosialisasi secara khusus belum pernah diadakan tetapi telah disisipkan pada setiap kesempatan pertemuan yang diadakan oleh Bappeda.

Menurut responden yang berhasil diwawancarai di lapangan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 88,19 % mengatakan kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak pernah dilakukan. Sisanya 9,03% mengatakan sosialisasi jarang dilakukan dan hanya 2,78% yang mengatakan jika sosialisasi tersebut sering dilakukan.

Tabel 13. Gambaran Kegiatan Sosialisasi

No	Sosialisasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	127	88,19
2.	Jarang	13	9,03
3.	Sering	4	2,78
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer,2012

Menurut anggota Tim IPPT belum maksimalnya kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya perda menjadi hambatan dalam kegiatan sosialisasi karena lahan pertanian yang dilindungi belum ditetapkan, sehingga tidak ada payung hukum yang jelas seandainya terjadi pelanggaran, demikian pula dalam menyampaikan informasi lahan-lahan mana yang dijadikan lahan yang dilindungi.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sangat diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan kontinyu, mengingat masih banyaknya kejadian konversi lahan pertanian.

Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan lahan pertaniannya seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi bentuk penggunaan tertentu.

Materi sosialisasi disamping tentang perlindungan lahan pertanian, juga tentang dampak dari konversi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bahwa konversi lahan pertanian merugikan baik dari segi ekonomi, sosial maupun dari sudut pandangan lingkungan.

4.3.2. Petugas

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya . Berdasarkan analisa data primer hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh gambaran tentang petugas yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dalam Tabel 14.

Tabel 14. Pemahaman Petugas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Pemahaman Petugas	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Paham	70	48,61
2.	Kurang paham	70	48,61
3.	Tidak paham	4	2,78
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer,2012

Berdasarkan Tabel 14 hanya 2,78% petugas dinilai tidak paham akan kebijakan, sedangkan sisanya hampir sama antara yang kurang paham dan paham akan kebijakan dimaksud, yaitu sebesar 48,61%. Penilaian ini berdasarkan pandangan masyarakat terhadap petugas yang ada selama ini. Sebagian besar masyarakat responden beranggapan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi dari petugas akan sangat mendukung tersampainya informasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Tim IPPT diketahui bahwa pada dasarnya mereka mengetahui dan memahami isi dari kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pemahaman yang dimaksud adalah seberapa tahu petugas akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dampak konversi lahan pertanian ke non pertanian. Pemahaman diperlukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

4.3.3. Dana

Menurut Subarsono (2011), sumberdaya keuangan merupakan faktor krusial untuk suatu program, seberapa besar dana dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Magelang kegiatan perlindungan lahan baru pada proses identifikasi lokasi. Dana dialokasikan untuk pelaksanaan identifikasi tersebut hingga menghasilkan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisa statistik menunjukkan bahwa faktor dana untuk kegiatan identifikasi lokasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sedang pada proses identifikasi lokasi. Masih diperlukan rangkaian kegiatan yang panjang untuk mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Rangkaian kegiatan tersebut menunggu adanya juklak dan juknis yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan perlindungan lahan pertanian

berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa sumber pembiayaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Pembiayaan juga dapat diperoleh dari :

- a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
- b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
- c. hibah; dan/atau
- d. investasi.

4.3.4. Respon Implementor

Para implementor kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang menunjukkan sikap bahwa mereka memberikan respon yang baik terhadap kebijakan. Meskipun baru pada tahap identifikasi lokasi yang dilakukan oleh Bappeda, hal ini telah menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan bersama instansi terkait telah berupaya melaksanakan isi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Respon positif terlihat dari semakin sulitnya proses perubahan penggunaan lahan. Meskipun usulan izin perubahan penggunaan lahan diterima oleh pihak BPN namun prosesnya semakin sulit, harus sesuai dengan aturan yang ada. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bappeda terhadap lahan pertanian yang akan dilindungi, dijadikan acuan dalam memproses izin perubahan penggunaan tanah yang diusulkan masyarakat.

Upaya pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian oleh pemerintah juga tertuang dalam RTRW yang ditetapkan dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Kenyataannya dilapangan, kondisi ini berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang hanya memiliki lahan pertanian yang sempit, sedangkan kebutuhan akan lahan juga mendesak untuk keperluan lainnya seperti untuk perumahan maupun sebagai tempat usaha.

Adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan mempersulit proses konversi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian ini untuk mengendalikan konversi lahan meskipun Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian belum ada.

Menurut Listyawati (2010), kunci utama untuk mengatasi masalah konversi lahan adalah penataan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping juga diperlukan komitmen antara instansi terkait untuk pelaksanaannya. Optimalisasi lembaga perizinan terkait dengan konversi lahan pertanian juga sangat penting, tidak hanya dengan *political will*, tetapi juga *political commitment* dan *law enforcement* yang tangguh.

4.3.5. Pemahaman terhadap Kebijakan

Dalam implementasinya di lapangan, para implementor mengerti akan kebijakan, terlihat dari semakin diperketatnya konversi lahan pertanian. Masing-masing anggota tim IPPT berpedoman pada aturan yang ada sesuai dengan tupoksinya. Hasil wawancara dengan anggota TIM IPPT dari Dinas Pertanian mengatakan bahwa:

“Hanya lahan pertanian yang tidak produktif saja yang bisa di konversi, tetapi jika lahan tersebut merupakan lahan yang produktif dengan sarana irigasi yang memadai, maka kami tidak akan memberikan izin konversinya.”

Demikian juga halnya dengan tim yang berasal dari Bappeda, yang berpedoman pada RTRW.

“Jika dalam RTRW lahan tersebut merupakan lokasi pengembangan, maka kami bisa saja memberikan rekomendasi untuk proses alih fungsinya.”

Namun demikian keputusan akhir dari proses perizinan konversi lahan ada pada kepala daerah, dalam hal ini Bupati, seperti diungkapkan oleh anggota tim yang bersal dari BPN

“Apapun rekomendasi kita keputusan akhir ada pada pucuk pimpinan di daerah, yaitu Bupati. Kendala inilah yang terkadang menyebabkan lamanya proses izin perubahan penggunaan lahan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing anggota tim memiliki kewenangan sendiri dalam memberikan penilaian terhadap lahan yang akan dikonversi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa anggota tim IPPT telah memahami tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai dengan pedoman yang dimiliki. Keputusan tentang diizinkan tidaknya proses konversi lahan tergantung pada kepala daerah.

Kondisi di lapangan, pengajuan izin perubahan penggunaan tanah terhenti pada kepala daerah. Permohonan izin telah di proses oleh tim tinggal menunggu keputusan kepala daerah. Proses terhenti tanpa ada kejelasan, apakah diizinkan atau tidak. Hal ini disebabkan belum adanya aturan daerah yang tegas mengenai perlindungan lahan.

4.3.6. Peraturan Pendukung

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa peraturan pendukung. Peraturan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

2. Peraturaturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 201 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pedoman yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Magelang dalam mengendalikan konversi lahan pertanian adalah :

1. SE Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
2. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam surat keputusan ini diatur tentang tanah pertanian yang dapat dikonversi dan yang dipertahankan (pasal 2), dan kriteria tanah pertanian yang dapat dikonversi dan yang harus dipertahankan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2010-2030, mengatur tentang peraturan zonasi untuk kawasan pertanian

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang, belum memiliki dasar hukum yang kuat. Karena belum ada perda yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut informan yang berhasil diwawancara dari Biro Hukum mengatakan bahwa perda tentang lahan pertanian berkelanjutan tersebut sedang dalam proses penyusunan.

4.3.7. SOP

SOP (*Standard Operating Procedures*) merupakan salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi untuk pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Hasil wawancara dengan tim IPPT diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang belum ada SOP yang dijadikan sebagai pedoman.

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru pada upaya mengendalikan alih fungsi lahan, yaitu dengan lebih selektif dalam memberikan izin perubahan penggunaan lahan. Tim IPPT masih menggunakan pedoman peraturan yang ada. Menurut Tim IPPT adanya SOP yang dilengkapi dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) sangat

penting, agar pelaksanaan kegiatan jelas baik tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai.

Menurut responden dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang berpendapat bahwa :

“Kami tidak berani memberikan pengarahannya tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pada masyarakat karena juklak dan juknisnya belum ada, pedoman yang akan kami gunakan belum jelas. Hal ini terkait dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.”

Jelas bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan, SOP, Juklak dan Juknis mutlak dibutuhkan, terutama bagi pelaksana kegiatan. Dari sisi masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan, kejelasan informasi tentang suatu kegiatan sangat diperlukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4.3.8. Koordinasi Antar Instansi

Implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, mengingat permasalahan lahan pertanian ini merupakan permasalahan lintas sektoral. Dari segi teknis, dinas pertanian sangat berkompeten dalam permasalahan ini, tetapi jika ditinjau dari segi lahannya, pihak BPN lah yang memiliki wewenang. Kebijakan perlindungan lahan merupakan wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait demi suksesnya implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut.

Kabupaten Magelang memiliki tim yang sangat berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu Tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan). Anggota tim ini terdiri dari beberapa instansi, diantaranya adalah Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan.

“Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, anggota tim saling berkoordinasi sesuai dengan tupoksi masing-masing, tetapi keputusan akhir ada pada kepala daerah.”

Demikian diungkapkan oleh Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Magelang.

4.3.9. Tingkat Pendidikan

Secara teoritis tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan, yang merupakan faktor lingkungan sosial ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Hasil pengamatan di lapangan dapat diketahui seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	42	29,17
2.	SMP	65	45,14
3.	SMA/PT	37	25,69
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer,2012

Analisa data primer menunjukkan bahwa 45,14% responden adalah berpendidikan SMP sedangkan sisanya yaitu 29,17% adalah berpendidikan SD dan 25,69% berpendidikan SMA/PT. Tingkat pendidikan masyarakat berkaitan dalam hal pengambilan keputusan dalam bidang pertanian, yaitu dalam penentuan komoditas, dalam usaha budidaya sampai pada proses pemasaran hasil pertanian.

4.3.10. Usia

Responden terdiri dari para pemilik lahan baik yang telah melakukan konversi maupun yang belum, berusia antara kurang dari 40 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Hasil pengamatan di lapangan mengenai usia responden adalah seperti pada Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Gambaran Usia Responden

No	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	<40 tahun	25	17,36
2.	40 – 60 tahun	96	66,67
3.	➤ 60 tahun	23	15,97
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer,2012

Berdasarkan Tabel 16, usia responden sebagian besar yaitu 66,67% adalah berkisar antara 40-60 tahun. 17,36% berusia kurang dari 40 tahun dan selebihnya yaitu 15,97 % berusia lebih dari 60 tahun.

Hasil analisa statistik, usia tidak berpengaruh pada implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Meskipun terdapat perbedaan usia, tetapi memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Pada dasarnya masyarakat setuju dan mendukung dengan adanya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut, tidak memandang apakah mereka yang berusia lebih muda ataupun yang berusia tua. Usia juga menunjukkan pengalaman dalam hal pertanian. Semakin tua usianya maka semakin berpengalaman dalam hal bertani.

Berdasarkan wawancara dengan responden, pada semua jenjang usia pada dasarnya setuju dengan adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alasan mereka setuju dengan hal tersebut adalah karena pertanian adalah merupakan mata pencaharian, dan juga untuk ketahanan pangan.

4.3.11. Kepemilikan Lahan

Masyarakat di Kabupaten Magelang rata-rata memiliki lahan pertanian yang sempit. Hasil penelitian di lapangan terhadap kepemilikan dapat dilihat dalam Tabel 17 berikut:

Tabel. 17. Kondisi Luas Lahan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
<0,5 Ha	89	64,49
0,5 – 1 Ha	37	26,81
>1 Ha	12	8,70
	138	100

Sumber : Analisa data primer,2012

Tabel 17 menunjukkan bahwa 64,49 % responden memiliki lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar, 26,81% memiliki lahan dengan luasan 0,5-1 hektar dan sisanya sebesar 8,70% memiliki lahan dengan luasan lebih dari 1 hektar. Relatif sempitnya lahan yang dimiliki petani mempengaruhi jenis tanaman yang

diusahakan dan inovasi teknologi yang akan diterapkan, sebab dalam melakukan inovasi teknologi dibutuhkan lahan yang cukup luas.

Sempitnya lahan yang dimiliki juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam upaya mengkonversi lahan pertanian yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur Cahyono di Dusun Sanggrahan Desa Kebon Agung Kecamatan Bandongan berikut:

“Lha gimana lagi lahan yang dipunyai hanya ini, sedangkan saya butuh untuk tempat tinggal dan bengkel, ya terpaksa saya bangun rumah dan bengkel, lokasinya juga di pinggir jalan.”

Karena lahan yang dimiliki terbatas, sedangkan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti untuk perumahan dan tempat usaha ataupun karena kebutuhan ekonomi, menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan pertanian. Untuk itu diperlukan adanya solusi untuk mengatasinya. Masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan sedangkan di sisi lain juga perlu adanya perlindungan terhadap lahan pertanian demi keberlangsungan usaha, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Dari hasil wawancara di lapangan terlihat bahwa hingga sekarang masyarakat Kabupaten Magelang masih mengandalkan lahan atas kepemilikan sendiri. Tabel 18 menunjukkan bahwa 93,48% respon memiliki lahan dengan status milik sendiri dan sisanya sebesar 5,07% berstatus bagi hasil dan 1,45% melakukan sewa lahan. Kondisi ini mempengaruhi tujuan petani menanam pada lahannya. Dengan melakukan usahatani pada lahan milik sendiri yang sebagian besar panennya berupa tanaman pangan, akan dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri dan jika ada kelebihan baru dijual. Sedangkan pada masyarakat yang melakukan sewa lahan biasanya akan menjual hasil panennya, atau dikatakan melakukan usahatani secara komersial.

Tabel. 18. Status Kepemilikan Lahan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sewa	2	1,45
Bagi hasil	7	5,07
Milik sendiri	129	93,48
	138	100

Sumber : Analisa data primer,2012

4.3.12. Alasan Konversi

Hasil penelitian di lapangan terhadap alasan masyarakat melakukan konversi lahan pertaniannya sebagian besar adalah untuk perumahan. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Alasan Masyarakat Melakukan Konversi Lahan Pertanian

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1. Perumahan	18	27
2. Tempat Usaha	20	30
3. Tempat tinggal	29	43
Jumlah	67	100

Sumber : Analisa data primer,2012

Tabel 19 menunjukkan bahwa 43% responden yang telah melakukan konversi, mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk tempat tinggal. 30% untuk tempat usaha dan 27% lainnya untuk perumahan. Peruntukan perumahan disini maksudnya adalah bahwa masyarakat menjual lahan pertaniannya pada pihak ketiga untuk kemudian dijadikan perumahan, kenyataan di lapangan ada sebagian masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya untuk dikonversi menjadi perumahan karena lahan disekitarnya telah terjual, jika tidak ikut menjual, lahan pertaniannya akan menjadi tidak produktif karena akses untuk pertumbuhan tanamannya menjadi terhambat.

Konversi lahan pertanian menjadi tempat tinggal yang dimaksud adalah alih fungsi dari lahan pertanian menjadi rumah untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan hal ini terjadi di pedesaan, dan proses pengalihannya tidak melalui prosedur perizinan yang legal. Masyarakat beranggapan bahwa lahan pertanian itu adalah miliknya dan mereka bebas untuk merubahnya menjadi apapun sebab hanya lahan itu yang dimilikinya.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat usaha umum dilakukan masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang strategis. Masyarakat beranggapan bahwa dengan merubahnya menjadi tempat usaha lebih menguntungkan daripada

untuk kegiatan pertanian. Hal ini biasa terjadi di daerah ibu kota kecamatan maupun di jalur transportasi. Seperti dikatakan oleh Bapak Imam Santoso dari Dusun Krajan Desa Trasan kecamatan Bandongan berikut:

“ Kalau sawah yang saya miliki itu tetap saya jadikan sawah, saya rasa rugi, hasilnya tidak seberapa, setahun hanya 2 kali panen, biaya yang harus saya keluarkan banyak. Tapi sekarang sawah saya sudah jadi toko begini kan hasil saya lebih banyak, dipinggir jalan utama lagi.”

Adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian oleh sebagian masyarakat, lambat laun akan diikuti lahan-lahan di sekitarnya. Dampaknya lahan pertanian menjadi berkurang, dan lahan pertanian yang masih ada akan menjadi terjepit oleh lahan yang telah terkonversi. Seperti yang dialami oleh bapak Bono dari Dusun Sutan Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan.

“Sawah saya ada diantara sawah-sawah yang sudah dijual pada pengembang perumahan, kalau saya tidak jual juga sawah saya akan mati ndak bisa dapat air. Ya sudah tak jual saja sekalian seperti yang lainnya.”

Lahan pertanian yang masih bertahan diantara lahan yang telah terkonversi, secara ekologi akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan air maupun sinar matahari. Hal tersebut karena aksesnya tertutup oleh lahan terbangun yang ada di sekelilingnya. Konversi lahan pertanian juga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Dampak konversi lahan pertanian salah satunya adalah berkurangnya resapan air tanah, berkurangnya penambahan air tanah oleh infiltrasi pada musim hujan, dan menimbulkan resiko kekeringan.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian bersifat *irreversible*, dalam arti bahwa lahan pertanian yang telah berubah fungsi untuk kepentingan non pertanian sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dikembalikan menjadi lahan pertanian. Sifat dari konversi lahan yang *irreversible* ini berakibat lebih lanjut pada lingkungan yang lebih buruk. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan khususnya dalam hal tata ruang. Jika perlindungan lahan pertanian dipandang penting, perlu pula direncanakan mengenai penempatan lokasi terbangun untuk kegiatan perekonomian dan pemukiman. Perencanaan penataan ruang dan wilayah ini perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

4.3.13. Dukungan Publik

Hasil analisa data primer di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pada dasarnya masyarakat setuju dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Seperti diungkapkan oleh beberapa responden berikut ini. Bapak Mahfud Ma'arif dari Dusun Glagah I Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan berpendapat sebagai berikut :

“Secara pribadi saya setuju sekali tentang perlindungan lahan pertanian itu karena kalau tidak dilindungi, akan banyak sawah yang berubah jadi perumahan. Lalu nantinya kita harus import beras, kan itu malah menyusahkan masyarakat.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Khaerodin dari Desa Kebon Agung Kecamatan Bandongan :

“Lahan pertanian perlu dilindungi karena itu matapencaharian masyarakat disini. Kalau banyak dijadikan perumahan dan lainnya kami ini akan cari makan dari mana lagi?”

Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa 87,68% responden setuju akan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dengan alasan demi ketahanan pangan dan mata pencaharian, namun 11,59% kurang setuju. Pada dasarnya mereka setuju tetapi perlu ada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalkan masyarakat butuh lahan untuk tempat tinggal ataupun kebutuhan lainnya dapat solusi dengan mudah. Alasan kekurangsetujuan masyarakat ini salah satunya disebabkan oleh sempitnya lahan yang mereka miliki dan hanya itu lahan yang dimiliki, sedangkan ada desakan kebutuhan akan lahan untuk peruntukan yang lainnya.

Tabel 20. Gambaran Dukungan Masyarakat terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1. Setuju	121	87,68
2. Kurang setuju	16	11,59
3. Tidak setuju	1	0,73
Jumlah	138	100

Sumber : Analisa data primer,2012

Masyarakat memerlukan adanya kepastian tentang lahan pertaniannya jika dijadikan lahan yang dilindungi, sebab jika lahan pertaniannya dilindungi berarti tidak diperbolehkan untuk dikonversi. Disisi lain masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama terhadap lahan untuk kepentingan yang berbeda. Sekiranya perlu adanya jaminan untuk kebutuhan masyarakat tersebut.

4.3.14. Komitmen Pelaksana

Para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang sangat komit dalam hal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin sulitnya izin perubahan lahan, terutama dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian. Hasil wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Magelang didapatkan bahwa pada tahun 2011 terdapat dari 22 pengajuan izin perubahan lahan yang berasal dari lahan pertanian, hanya 7 yang disetujui. Hal ini mempertimbangkan kriteria konversi lahan, bahwa untuk lahan yang merupakan lahan pertanian produktif dan memiliki saluran irigasi yang memadai tidak dapat dikonversi. Secara terperinci data mengenai pengajuan perubahan lahan yang dapat dikumpulkan adalah seperti pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Izin Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
Pengajuan	47	22	15
Disetujui	30	7	6
Tidak disetujui	17	15	9

Sumber : Data dari BPN, diolah

Tabel 21 menunjukkan bahwa pengajuan perubahan penggunaan lahan semakin berkurang. Sulitnya perizinan perubahan lahan menyebabkan berkurangnya masyarakat mengajukan perizinan. Kenyataan dilapangan, banyak masyarakat yang melakukan konversi lahan tanpa ada pengajuan izin perubahan. Jadi meskipun pemerintah telah menjalankan kebijakan namun masyarakat masih ada yang melakukan konversi. Ketaatan masyarakat dirasakan kurang dalam hal ini, karena tidak adanya aturan dan sanksi yang jelas bagi ketidaktaatan tersebut.

Perlu kiranya segera ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan jelas sebab lahan yang dilindungi telah ditetapkan, sanksi bagi pelanggaran juga telah ada, disamping itu insentif bagi penataan juga diatur. Dengan demikian masyarakat mendapatkan jaminan kepastian akan lahan yang dilindungi, tujuan untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan juga akan tercapai.

4.4. Strategi Kebijakan

Dalam menentukan pilihan strategi dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang, dilakukan diskusi dengan *key person* yang berkompeten dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. *Key person* dimaksud adalah :

- Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang
- Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Bappeda Kabupaten Magelang
- Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Magelang
- Akademisi dari Politeknik Muhammadiyah Magelang
- Perwakilan dari LSM Wahana Belajar Petani

Berdasarkan wawancara yang mendalam dari para *key person* di dapatkan beberapa alternatif untuk penentuan strategi sebagai berikut :

- Aspek Ekologi

Dipandang dari aspek ekologi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Konservasi tanah dan air,

yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah dan air agar dapat mendukung proses produksi pertanian.

- b. Peningkatan kesuburan tanah

yang dilakukan dengan pemupukan berimbang.

- Aspek Teknis

Dipandang dari aspek teknis upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan benih unggul,
yaitu dengan mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan benih unggul maupun dengan mengadakan bantuan benih unggul pada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani.
- b. Perbaikan sarana irigasi,
yaitu upaya perbaikan jaringan irigasi baik jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun jaringan irigasi desa.
- c. Pertanian organik,
yaitu upaya membudayakan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan.

- Aspek Sosial

Dipandang dari aspek sosial upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan tentang konversi lahan,
merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat lebih lanjut dari konversi lahan pertanian.
- b. Sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,
merupakan upaya mengenalkan pada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Perubahan pola hidup masyarakat
dalam hal pemenuhan kebutuhan akan perumahan, yaitu memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pengembangan perumahan tidak harus selalu melebar tapi keatas sehingga kebutuhan akan tanah untuk perumahan dapat di kurangi, misalnya dengan program rumah susun.

- Aspek Ekonomi

Dipandang dari aspek ekonomi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya teknik insentif dan disinsentif,
yaitu pemberian penghargaan pada masyarakat yang belum melakukan konversi lahan maupun sanksi pada yang melakukan konversi
- b. Perbaikan infrastruktur pendukung,
yaitu perbaikan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan pada lokasi yang direncanakan sebagai daerah pemukiman.
- c. Penyediaan sarana pemasaran,
seperti misalnya pembangunan sub terminal agribisnis untuk mengakomodasi hasil pertanian.
- d. Jaminan harga produk pertanian,
merupakan jaminan harga bagi produk pertanian sehingga petani tidak selalu mengalami kerugian.

Hasil analisa pendapat gabungan para responden dalam penentuan strategi pencapaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah seperti pada Tabel 22 dan gambar 7 berikut:

Tabel 22. Aspek-aspek Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Aspek	Bobot
Ekologi	53.5
Teknis	21.5
Sosial	13.0
Ekonomi	12.0

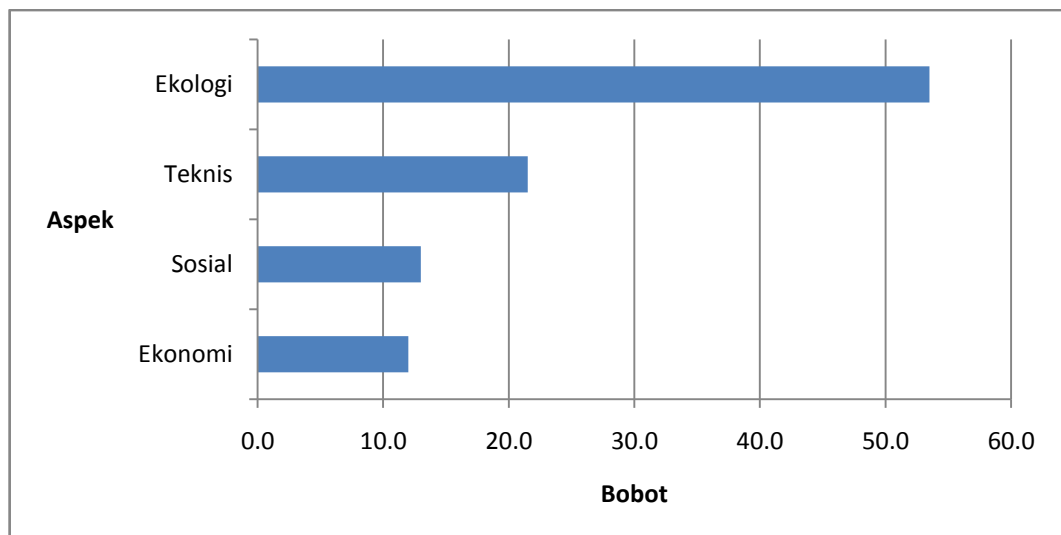
Sumber : Analisa data primer.2012

Gambar 7 menunjukkan bahwa aspek ekologi dengan bobot 53,5% merupakan aspek paling penting dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Aspek berikutnya adalah aspek teknis dengan bobot 21,5%, aspek

sosial dengan bobot 13% dan aspek yang terakhir adalah aspek ekonomi dengan bobot 12%. Nilai *inconsistensi ratio* = 0,08 berarti hasil analisa tersebut dapat diterima karena lebih kecil dari batas maksimum, yaitu 0,1.

Terpilihnya aspek ekologi sebagai prioritas utama menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), lahan pertanian dalam hal ini sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan, disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan *top soil*

Gambar 7. Kriteria Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sumber : Analisa AHP dengan expert choice

Dalam kegiatan pertanian terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Budidaya tanaman pangan dalam pertumbuhannya akan berinteraksi dengan ekologi disekitarnya. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kimia tanah, iklim dan pengolahan pertanian.

Hasil analisa secara keseluruhan terhadap alternatif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan skala prioritasnya adalah seperti pada Tabel 23 dan Gambar 8. Didapatkan bahwa alternatif konservasi tanah dan air menempati

prioritas pertama dengan bobot 30.5%. Prioritas kedua adalah perbaikan sarana irigasi dengan bobot 12,3%. Prioritas ketiga dengan bobot 11.3% adalah benih unggul.

Konservasi tanah dan air merupakan prioritas utama karena merupakan bagian terpenting dalam budi daya pertanian. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab segala sesuatu tindakan konservasi tanah pada sebidang lahan akan mempengaruhi tata guna air pada lahan tersebut. Jadi dapat dikatakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan untuk mengkonservasi tanah adalah juga merupakan tindakan konservasi akan air. Konservasi tanah dan air dianggap penting karena, dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil panen, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan

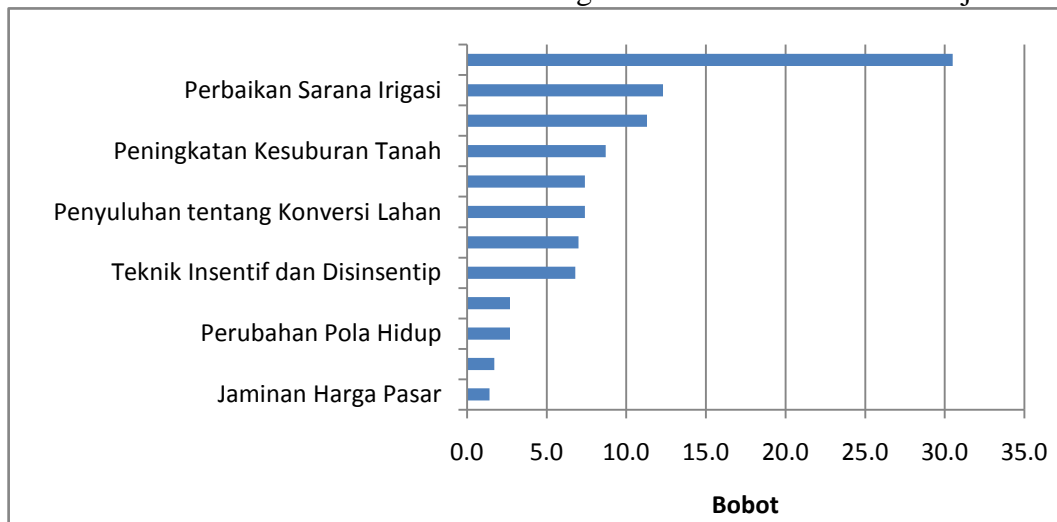
Tabel. 23. Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Alternatif	Bobot
Konservasi Tanah dan Air	30.5
Perbaikan Sarana Irigasi	12.3
Benih Unggul	11.3
Peningkatan Kesuburan Tanah	8.7
Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	7.4
Penyuluhan tentang Konversi Lahan	7.4
Pertanian Organik	7.0
Teknik Insentif dan Disinsentif	6.8
Perbaikan Infrastruktur Pendukung	2.7
Perubahan Pola Hidup	2.7
Penyediaan Sarana Pemasaran	1.7
Jaminan Harga Pasar	1.4

Sumber: Analisa data primer, 2012

Sistem pertanian modern yang merupakan *High-intensive farming system* memberikan dampak negatif, karena untuk meningkatkan produksi diperlukan perlakuan penambahan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Dampak dari itu adalah kerusakan tanah karena endapan pupuk kimia yang terakumulasi dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan perubahan pola panen. Dampak lain yang dapat dirasakan adalah berkurangnya populasi mamalia, burung, invertebrata, dan spesies tumbuhan lain. Alasan ini yang menjadi dasar diperlukannya upaya konservasi untuk keberlanjutan kegiatan pertanian, agar suplai bahan pangan tercukupi, sehingga ketahanan pangan terjaga.

Gambar 8. Prioritas Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sumber : Analisa HP dengan expert choice

Dalam pertanian yang berwawasan lingkungan, tindakan konservasi merupakan hal yang penting. Tujuan dari kegiatan konservasi adalah untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lingkungan. Pada dasarnya semua kegiatan konservasi mengarah pada upaya menjaga kelestarian sumber air, meningkatkan sumber daya alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pada prinsipnya pertanian konservasi adalah pertanian yang mengandalkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Semua upaya tersebut pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui pertanian yang berkelanjutan.

Metode konservasi tanah dan air dapat dilakukan baik secara vegetatif, mekanik maupun secara kimia. Secara vegetatif misalnya dengan penanaman penutup lahan, penanaman dengan lajur berselang seling, menanam sesuai garis kontur, pergiliran tanaman, dan reboisasi atau penghijauan. Konservasi secara mekanik dilakukan dengan pengolahan tanah, pembuatan terasering pada lahan miring. Secara kimia konservasi tanah dan air dilakukan dengan penambahan bahan kimia sebagai pemantap tanah sehingga tanah dapat resisten terhadap erosi.

Konservasi tanah dan air serta perbaikan saran irigasi menjadi pilihan utama karena kedua pilihan alternatif tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Untuk lahan-lahan yang kurang dan tidak subur, jika tidak dilakukan tindakan konservasi dan perbaikan sarana irigasi akan semakin mempermudah upaya konversi lahan pertanian. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan tim IPPT dalam memutuskan perubahan penggunaan tanah adalah status produktif tidaknya lahan dimaksud. Jika suatu lahan sudah tidak produktif lagi dan tidak ada saluran irigasi yang mencukupi lahan tersebut, maka izin perubahan penggunaan tanah akan mudah didapatkan.

Dengan kondisi lingkungan dewasa ini, sistem pertanian konservasi dianggap tepat untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan. Demikian pula halnya dalam strategi perlindungan lahan pertanian agar usaha pertanian dapat berkelanjutan, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang baru sampai pada proses identifikasi lahan, dengan hasil luas lahan pertanian berkelanjutan adalah 42.079,00 hektar yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering dan tersebar di 21 kecamatan. Kegiatan identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari Badan Pertanahan Nasional, RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010-2030, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Magelang tahun 2010, dan hasil survey tahun 2012. Dari hasil identifikasi lokasi yang dilakukan Bappeda pada tahun 2011 menghasilkan suatu dokumen RTR PLPB (Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional. Di Kabupaten Magelang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun

insentif yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

3. Dari hasil analisis AHP, maka alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang adalah dari aspek ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Upaya yang menjadi prioritas utama adalah konservasi tanah dan air, karena dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Pemda Kabupaten Magelang agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
3. Perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, sebab kebanyakan masyarakat hanya memiliki lahan yang sempit. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha . Misalnya dengan menyiapkan lahan untuk perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, maupun penyediaan lokasi untuk tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptaningrum, Y. 2009. Optimasi Penggunaan Lahan Untuk Perlindungan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Purwokerto). *Tesis*. IPB. Bogor. 108p
- FAO.1989. Sustainable Development and Natural Resources Management. Twenty-Fifth Conference, Paper C 89/2 simp 2, Food and Agriculture Organization, Rome.
- Hadi, S.P, 2005.*Dimensi Lingkungan – Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 143p.
- Harjono, M.R. 2005. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal. *Tesis*. Undip. Semarang.131p
- Iqbal, M. 2007. Fenomena dan Trategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa tenggara Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(4):287-303
- Iqbal,M dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(2):167-182.
- Irawan, B dan S. Friyatno. 2002. Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya. *Journal Socio Economic of Agricuilturre and Agribusiness*. 2:2002:33p.
- Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(1): 1-18
- 2008. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 26(2):116-131.
- Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>. diakses tgl 5-3-2012.p:1-16.
- Listyawati, H. 2010. Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perpektif Penatagunaan Tanah di Indonesia. *Mimbar Hukum*.22(1):37-57
- Mulyani, A; S. Rirung, dan I. Las. 2011. Potensi dan Ketersediaan Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian*. 30(2): 73-80.

- Nasution, M.A. 2001. *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta. 156p.
- Nugroho, D.R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 197p.
- Nurmanaf, A.R, H. Mayrowani, dan E. Jamal. 2001. Evaluasi Sosial Ekonomi Multifungsi Lahan Sawah. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. ISBN 979-9474-06-X:121-136
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*. 25(4):123-129.
- Rustiadi, E. 2001. Alih Fungsi lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo, Bogor. 10-11 Mei 2001. 11p.
- Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad, S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .p 61-86
- Saaty, L. Thomas. 1993. *Decision making for Leaders The Analytical hierarchy process for decisions in Complex World*. (Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, diterjemahkan Oleh Liana Setiono). Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270p.
- , 2008. *Decision Making With The Analytic Hierarchy Process*. *Int. J. Services Sciences*. 1(1):83-98
- Sabiham, S .2008. Manajemen Sumberdaya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan, dalam Arsyad, S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .p.3-16
- Sarwono, J. 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif Secara Benar*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 207p
- Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002. ISBN 979-9474-20-5:67-83.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 138 p.

- Suryana, A. 2005. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional*. Makalah dibawakan pada Seminar Sistem Pertanian berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan Nasional tanggal 15 Pebruari 2005 di Universitas Sebelas Maret Solo.p 34-74.
- Syamson,A.B. 2011. Identifikasi Potensi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Untuk menyusun RTRW Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. *Tesis*. IPB. Bogor. 93p
- Usman, H dan P.S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 170p.
- Wahab, S.A. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari reformasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 123p.
- World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama, diterjemahkan oleh Sumantri, B). PT.Gramedia. Jakarta. 514p.
- UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- PERDA Kabupaten Magelang No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030.